



LAPORAN KEUANGAN BA 015
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
TA 2008
(AUDITED)



NAGARA
DANA
RAKCA

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
JI. Wahidin No.1,
Jakarta

BAGIAN ANGGARAN 015



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2008
*AUDITED***

Jalan Wahidin No 1 Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pemberian. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp917.771.650.024.199,00 atau 108,96 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp12.051.098.275.474,00 atau 79,69 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2008;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Keuangan TA 2008. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp127.911.078.098.963,00 dan Kewajiban sebesar Rp343.821.563.014,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kementerian Keuangan per 31 desember 2008

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2008 (Audited)

- adalah sebesar Rp127.567.256.535.922,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
 4. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahunan TA 2008 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa BPK-RI (*Audited*).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan serta untuk mempermudah penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :

- pernyataan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Pernyataan Telah Direviu

Merupakan pernyataan dari parat pengawasan intern kementerian negara/lembaga atas hasil reviu terhadap LKKL sebelum dipertanggungjawabkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.

11. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

12. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.

13. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi TAYL dengan tahun anggaran berjalan.

14. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan Laporan LRA untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat melihat daftar laporan pada lampiran laporan keuangan.

15. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Kementerian Negara/Lembaga.

16. Lampiran Laporan Keuangan

- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
 - i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan

- ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- iii) Neraca Percobaan
- b. Laporan barang pengguna
 - i) Laporan Barang Pengguna Tahunan
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Gabungan
 - ii) Laporan Posisi BMN di Neraca
- c. Laporan Keuangan BLU:
 - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
 - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- d. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
- e. Laporan Rekening Pemerintah
- f. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

17. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

- a. Berita Acara Rekonsiliasi LRA
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
- c. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
- d. Mutasi Rekening antara (rekening 600.000.411 dan rekening 508.000084)
- e. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran pada rekening 508.000071 (Penerimaan Pertambangan dan Perikanan)
- f. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- g. Laporan Barang Sitaan Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	X
Daftar Lampiran	xi
Daftar Singkatan	xii
Pernyataan Tanggung Jawab	xiii
Pernyataan Telah Direviu	xiv
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2008 dan 2007)	3
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2008 dan 2007)	4
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Kebijakan Akuntansi	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan dan Hibah	21
B.2. Belanja	43
B.3. Catatan Penting Lainnya	53
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	56
C.1. Penjelasan Umum Neraca	56
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	57
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	95
D. Pengungkapan Penting Lainnya	96
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	
D.2. Rekening Pemerintah	

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor PER- 51 /PB/2008

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

- Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
- Laporan Posisi BMN di Neraca

Lampiran-Lampiran Lain :

1. Laporan Keuangan BLU:
 - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
 - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
3. Laporan Rekening Pemerintah
4. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
5. Berita Acara Rekonsiliasi LRA
6. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
7. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
8. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1	Rekapitulasi Jumlah Satker menurut Eselon I	12
Tabel 2	Rekapitulasi Jumlah Satker menurut Eselon I	14
Tabel 3	Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2008	21
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2008 dan 2007	23
Tabel 5	Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Tahun Anggaran 2008	23
Tabel 6	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2008	24
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2008 dan 2007	24
Tabel 8	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008	28
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008 dan 2007	29
Tabel 10	Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun Anggaran 2008	30
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun Anggaran 2008 dan 2007	31
Tabel 12	Daftar Pengembalian Pendapatan Bea Keluar Melalui Kompensasi Tahun Anggaran 20008	32
Tabel 13	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2008	33
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2008 dan 2007	33
Tabel 15	Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2008	35
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2008 dan 2007	36
Tabel 17	Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun Anggaran 2008	39
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun Anggaran 2008 dan 2007	40
Tabel 19	Daftar 10 BUMN Penghasil Deviden Terbesar Tahun Anggaran 2008	41
Tabel 20	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun Anggaran 2008	41
Tabel 21	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun Anggaran 2008 dan 2007	42
Tabel 22	Realisasi Pendapatan BLU Tahun Anggaran 2008	42
Tabel 23	Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pagu DIPA menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2008	43
Tabel 24	Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008 dan 2007	43
Tabel 25	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I Tahun Anggaran 2008	44
Tabel 26	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2008	44
Tabel 27	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2008 dan 2007	45
Tabel 28	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2008	46
Tabel 29	Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2008	47
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2008 dan 2007	47
Tabel 31	Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I Tahun Anggaran 2008	48
Tabel 32	Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2008	49
Tabel 33	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2008 dan 2007	49
Tabel 34	Realisasi Belanja Barang Per Eselon I Tahun Anggaran 2008	50
Tabel 35	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2008	51
Tabel 36	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 dan 2007	51
Tabel 37	Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Tahun Anggaran 2008	52
Tabel 38	Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun Anggaran 2008 dan 2007	53
Tabel 39	Komposisi Neraca	56

Tabel 40	Kas di Bendahara Pengeluaran Per Unit Eselon I	57
Tabel 41	Saldo Rekening Yang Bukan Berasal dari Uang Persediaan	58
Tabel 42	Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I	58
Tabel 43	Saldo Rekening yang bukan Kas di Bendahara Penerimaan	58
Tabel 44	Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I	59
Tabel 45	Piutang Pajak Per Unit Eselon I	60
Tabel 46	Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2008	61
Tabel 47	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2008	61
Tabel 48	Rincian Piutang Pajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Per 31 Desember 2008	63
Tabel 49	Rincian Piutang PNBP Per Unit Eselon I	64
Tabel 50	Rincian Piutang PNBP Pertambangan Panas Bumi	65
Tabel 51	Rincian Piutang PNBP di DJP Per 31 Desember 2008	66
Tabel 52	Rincian Piutang PNBP di DJPB Per 31 Desember 2008	66
Tabel 53	Rincian Piutang PNBP di BPPK Per 31 Desember 2008	68
Tabel 54	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I	68
Tabel 55	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I	69
Tabel 56	Persediaan Per Eselon I	70
Tabel 57	Persediaan Per Jenis	70
Tabel 58	Daftar Saham BUMN	72
Tabel 59	Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset per 31 Desember 2008 dan 2007	73
Tabel 60	Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	75
Tabel 61	Mutasi/Perubahan Tanah	76
Tabel 62	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	77
Tabel 63	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin	78
Tabel 64	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	79
Tabel 65	Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan	80
Tabel 66	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	81
Tabel 67	Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	82
Tabel 68	Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	83
Tabel 69	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya	84
Tabel 70	Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	86
Tabel 71	Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan	86
Tabel 72	Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU	87
Tabel 73	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	87
Tabel 74	Aset Tetap Lainnya BLU	87
Tabel 75	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2008 dan 2007	89
Tabel 76	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	89
Tabel 77	Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	90
Tabel 78	Aset Tak Berwujud BLU	90
Tabel 79	Aset Lain-lain Per Unit Eselon I per 31 Desember 2008 dan 2007	91
Tabel 80	Dana Kelolaan BLU	92
Tabel 81	Posisi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2008 dan 2007	92
Tabel 82	Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 dan 2007	93
Tabel 83	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2008	93

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	22
Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan TA 2008	
Grafik 2	22
Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2008	
Grafik 3	25
Komposisi Realisasi Pendapatan Perpjakan Per Jenis Penerimaan TA 2008	
Grafik 4	28
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008	
Grafik 5	29
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2008 dan 2007	
Grafik 6	30
Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2008	
Grafik 7	34
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2008 dan 2007	
Grafik 8	34
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2008	
Grafik 9	36
Perbandingan Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2008 dan 2007	
Grafik 10	36
Komposisi Realisasi Penerimaan SDA TA 2008	
Grafik 11	40
Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2008 dan 2007	
Grafik 12	43
Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2008 dan 2007	
Grafik 13	45
Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2008	
Grafik 14	46
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2008	
Grafik 15	46
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2008	
Grafik 16	48
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2008	
Grafik 17	50
Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2008	
Grafik 18	52
Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2008	
Grafik 19	56
Komposisi Neraca	
Grafik 20	62
Piutang Pajak DJP Per 31 Desember 2008	
Grafik 21	74
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset	
Grafik 22	74
Perkembangan Aset Tetap Per Jenis Aset Tetap	

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1 | LRA Pendapatan Dan LRA Pengembalian Pendapatan |
| Lampiran 2 | LRA Belanja Dan LRA Pengembalian Belanja |
| Lampiran 3 | Neraca Percobaan |
| Lampiran 4 | Berita Acara Rekonsiliasi LRA |
| Lampiran 5 | Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap |
| Lampiran 6 | Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel |
| Lampiran 7 | Laporan Barang Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel |
| Lampiran 8 | Laporan Barang Pengguna Tahunan Gabungan |
| Lampiran 9 | Laporan Posisi BMN Di Neraca |
| Lampiran 10 | Mutasi Rekening Antara (Rekening 600.000.411 Dan Rekening 508.000084) |
| Lampiran 11 | Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Rekening 508.000071
(Penerimaan Pertambangan Dan Perikanan) |
| Lampiran 12 | Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Satuan Mata Uang |
| Lampiran 13 | Rincian Dan Status Piutang Dividen Dan Denda |
| Lampiran 14 | Piutang Bukan Pajak Dari Penerimaan SDA Migas |
| Lampiran 15 | Rincian Piutang Piutang Panas Bumi |
| Lampiran 16 | Peraturan Mengenai Kebijakan Piutang Bapepam-LK |
| Lampiran 17 | Rincian Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK |
| Lampiran 18 | Laporan Keuangan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) |
| Lampiran 19 | Laporan Keuangan BLU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) |
| Lampiran 20 | Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural : Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) |
| Lampiran 21 | Laporan Rekening Pemerintah |
| Lampiran 22 | Tindak Lanjut Atas Temuan BPK |
| Lampiran 23 | Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai |
| Lampiran 24 | Laporan Barang Sitaan Direktorat Jenderal Pajak |

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	:	Uang Persediaan
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan

**DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (BA 015) Kementerian Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 (*audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali atas terdapatnya; (1) perbedaan nilai Penerimaan Perpjakan yang tercantum pada SAI dengan sumber data SAU sebesar 0,03%; (2) kelemahan administrasi piutang pajak pada beberapa satker berkenaan dengan saldo negatif, duluawarsa penagihan, dan penggabungan dan pemecahan satker; dan (3) kelemahan pengelolaan aset tetap berkenaan dengan koreksi hasil revaluasi aset yang menggunakan program aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada beberapa satker. Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah, tetap akan kami tindaklanjuti.

Jakarta, Mei 2009

Menteri Keuangan,



INSPEKTORAT JENDERAL
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED)
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (unaudited) untuk tahun anggaran 2008 berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat demikian.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya; (1) perbedaan nilai Penerimaan Perajakan yang tercantum pada SAI dengan sumber data SAU sebesar 0,03 %; (2) kelemahan administrasi piutang pajak pada beberapa satker berkenaan dengan saldo negatif, duluwarsa penagihan, dan penggabungan dan pemecahan organisasi; (3) kelemahan pengelolaan aset tetap berkenaan dengan penambahan aset yang berasal dari belanja barang, dan penggunaan aplikasi input revaluasi aset (Maya) pada satker tertentu. Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak manajemen.

Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan secara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, Februari 2009



I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Keuangan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2008 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2008.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2008 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp658.360.450.104.268,00 atau mencapai 108,42 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp259.411.199.919.931,00 atau mencapai 110,34 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2008 adalah sebesar Rp12.051.098.275.474,00 atau mencapai 79,69 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp11.819.190.843.252,00 atau 82,50 persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp203.148.034.335,00 atau 45,42 persen dari anggarannya, dan Belanja Hibah sebesar Rp28.759.397.887,00 atau 8,26 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2008 dan 2007 dapat disajikan sebagai berikut:

		<u>(dalam rupiah)</u>			
		TA 2008		TA 2007	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Perpajakan		607.227.490.000.000	658.360.450.104.268	492.011.590.805.000	490.995.285.360.546
PNBP		235.107.335.630.945	259.411.199.919.931	135.927.718.702.762	157.317.895.384.951
Hibah		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		842.334.793.012.183	917.771.650.024.199	627.939.309.507.762	648.313.180.745.497
BELANJA					
Belanja Rupiah Murni		14.326.517.664.104	11.819.190.843.252	9.236.078.307.000	6.971.088.629.684
Belanja PLN		447.306.200.000	203.148.034.335	583.794.896.000	16.623.347.933
Belanja Hibah		348.100.084.000	28.759.397.887	39.913.427.000	11.486.861.271
Jumlah Belanja		15.121.923.948.104	12.051.098.275.474	9.859.786.630.000	6.999.198.838.888

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp127.911.078.098.936,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp93.782.740.244.521,00, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp828.379.875.579,00, Aset Tetap sebesar Rp29.687.538.231.724,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp3.612.419.747.112,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp343.821.563.014,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp127.567.256.535.922,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp93.438.918.681.507,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp34.128.337.854.415,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai kenaikan/ (penurunan)
	31 Desember 2008	31 Desember 2007	
Aset	127.911.078.098.936	93.834.185.052.482	34.076.893.046.454
Aset Lancar	93.782.740.244.521	76.793.232.222.179	16.989.508.022.342
Investasi Jangka Panjang	828.379.875.579	593.630.343.750	234.749.531.829
Aset Tetap	29.687.538.231.724	12.926.903.489.397	16.760.627.014.366
Aset Lainnya	3.612.419.747.112	3.520.418.997.156	3.543.868.637.376
Kewajiban	343.821.563.014	2.024.920.395.221	(1.681.098.832.027)
Kewajiban Jangka Pendek	343.821.563.014	2.024.920.395.221	(1.681.098.832.027)
Ekuitas Dana	127.567.256.535.922	91.809.264.657.261	35.757.991.878.661
Ekuitas Dana Lancar	93.438.918.681.507	74.768.311.826.958	18.670.606.854.549
Ekuitas Dana Investasi	34.128.337.854.415	17.040.952.830.303	17.087.385.024.112

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRAKT PERBANDINGAN TA 2008 dan 2007)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN

NO	URAIAN	2008			2007		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8=(7/6)*100
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
1	1 PENERIMAAN DALAM NEGERI	842,334,825,630,945	917,771,650,024,199	108.96	627,939,309,507,762	648,313,182,906,496	103.24
	a. Penerimaan Perpajakan	607,227,490,000,000	658,360,450,104,268	108.42	492,011,590,805,000	490,995,285,360,545	99.79
	b: Penerimaan Negara Bukan Pajak	235,107,335,630,945	259,411,199,919,931	110.34	135,927,718,702,762	157,317,897,545,951	115.74
2	2 HIBAH	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	842,334,825,630,945	917,771,650,024,199	108.96	627,939,309,507,762	648,313,182,906,496	103.24
B.	BELANJA						
	Belanja Pegawai	7,332,036,731,373	6,142,408,788,889	83.77	2,259,420,577,000	1,778,481,089,394	78.71
	Belanja Barang	4,310,577,314,231	2,566,504,146,275	59.54	3,418,827,153,000	1,998,584,110,900	58.46
	Belanja Modal	3,479,309,902,500	2,433,051,247,366	69.93	4,181,438,900,000	2,613,485,006,915	62.50
	Pembayaran Bunga Utang	-	909,134,092,944	-	-	608,648,631,679	-
	Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Hibah	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	Belanja Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	15,121,923,948,104	12,051,098,275,474	79.69	9,859,686,630,000	6,999,198,838,888	70.99
C.	PEMBIAYAAN						
1	1 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-
	a. Perbankan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
	b. Non Perbankan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
2	2 PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	-	-	-	-	-	-
	a. Perarikan Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Neg	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 + C.2)	-	-	-	-	-	-

Jakarta, Mei 2009

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Abdul Kadir S.
NIP 060042228



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN

NO	URAIAN	2008				2007			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7	8	9	10=(8/7)*100
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1+C.2)								

Jakarta, Mei 2009

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Abdul Kadir S.
NIP 060042228



III.NERACA

(NSAIKPT PERBANDINGAN TA 2008 dan 2007)

NERACA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 DEPARTEMEN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	TAHUN 2008	TAHUN 2007	JUMLAH	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,910,417,866	11,778,438,432	(4,868,020,566)	(41.33)
Kas di Bendahara Penerimaan	2,551,056,124	131,809,629,419	(129,258,573,295)	(98.06)
Kas pada BLU	221,279,325,236	13,808,096,801	207,471,228,435	1,502.53
Piutang Pajak	55,545,222,477,951	42,042,099,564,945	13,503,122,913,006	32.12
Piutang Bukan Pajak	37,821,028,316,862	34,458,942,679,003	3,362,085,637,859	9.76
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	236,813,241	1,465,194,852	(1,228,381,611)	(83.84)
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	21,505,689,090	20,087,902,083	1,417,787,007	7.06
Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	27,310,262,126	5,659,120,120	21,651,142,006	382.59
Piutang Bukan Pajak Lainnya	-	114,736,007	(114,736,007)	(100.00)
Persediaan	136,695,886,025	107,466,860,517	29,229,025,508	27.20
JUMLAH ASET LANCAR	93,782,740,244,521	76,798,232,222,179	16,989,508,022,342	22.12
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN				
Dana Bergulir/Dana Kelolaan BLU	-	3,451,867,887,420	(3,451,867,887,420)	(100.00)
Investasi Non Permanen BLU	707,595,178,400	593,630,343,750	113,964,834,650	19.20
Investasi Non Permanen Lainnya	120,784,697,179	-	120,784,697,179	0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	828,379,875,579	4,045,498,231,170	(3,217,118,355,591)	(79.52)
ASET TETAP				
Tanah	14,429,849,284,717	2,163,847,241,366	12,266,002,043,351	566.86
Peralatan dan Mesin	5,918,215,830,895	5,115,729,712,372	802,486,118,523	15.69
Gedung dan Bangunan	7,565,818,510,870	3,848,353,886,512	3,717,464,624,358	96.60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	150,584,152,346	100,318,650,329	50,265,502,017	50.11
Aset Tetap Lainnya	242,709,155,830	405,382,420,518	(162,673,264,688)	(40.13)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,376,403,863,346	1,293,271,578,300	83,132,285,046	6.43
Peralatan dan Mesin BLU	3,709,034,840	-	3,709,034,840	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	206,174,500	-	206,174,500	0.00
Aset Tetap Lainnya BLU	42,224,380	-	42,224,380	0.00
JUMLAH ASET TETAP	29,687,538,231,724	12,926,903,489,397	16,760,634,742,327	129.66
ASET LAINNYA				
Tagihan Tuntutan Perpendaharaan / TGR	8,857,225,495	6,480,383,549	2,376,841,946	36.68
Aset Tak Berwujud	201,420,558,400	37,418,315,534	164,002,242,866	438.29
Aset Tak Berwujud BLU	484,208,790	-	484,208,790	0.00
Aset Lain-lain	222,442,451,606	24,652,410,653	197,790,040,953	802.32
Dana Kelolaan BLU	3,179,215,302,821	-	3,179,215,302,821	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	3,612,419,747,112	68,551,109,736	3,543,868,637,376	5,169.67
JUMLAH ASET	127,911,078,098,936	93,834,185,052,482	34,076,893,046,454	36.32
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Kepada Pihak Ketiga	85,383,199,848	1,881,332,327,370	(1,795,949,127,522)	(95.46)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	248,976,889,176	-	248,976,889,176	0.00
Uang Muka dari KPPN	6,910,417,866	11,778,438,432	(4,868,020,566)	(41.33)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	2,551,056,124	131,809,629,419	(129,258,573,295)	(98.06)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	343,821,563,014	2,024,920,395,221	(1,681,098,832,207)	(83.02)
JUMLAH KEWAJIBAN	343,821,563,014	2,024,920,395,221	(1,681,098,832,207)	(83.02)
EKUITAS DANAI				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	93,415,303,559,270	76,528,369,197,010	16,886,934,362,260	22.07
Cadanga Persediaan	136,695,886,025	107,466,860,517	29,229,025,508	27.20
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang	(334,360,089,024)	(1,881,332,327,370)	1,546,972,238,346	(82.23)
Dana Lancar BLU	221,279,325,236	13,808,096,801	207,471,228,435	1,502.53
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	93,438,918,681,507	74,768,311,826,958	18,670,606,854,549	24.97
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	828,379,875,579	4,045,498,231,170	(3,217,118,355,591)	(79.52)
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	29,687,538,231,724	12,926,903,489,397	16,760,634,742,327	129.66
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	3,612,419,747,112	68,551,109,736	3,543,868,637,376	5,169.67
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	34,128,337,854,415	17,040,952,830,303	17,087,385,024,112	100.27
JUMLAH EKUITAS DANA	127,567,256,535,922	91,809,264,657,261	35,757,991,878,661	38.95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	127,911,078,098,936	93,834,185,052,482	34,076,893,046,454	36.32

Jakarta, 26 Mei 2009

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Abdul Kadir S.
NIP 060042228



IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
9. Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan .
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK.
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

13. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1994 yang mengatur tentang Syarat-syarat and Pedoman Kerjasama KBH Minyak dan Gas Bumi.
14. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
22. Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak Production Sharing dan Kegiatan Pertamina sendiri.
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan.
24. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005 tentang Tata cara pembayaran kembali PPN dan PPnBM atas perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan oleh BU atau BUT dalam pengusahaan minyak dan gas bumi.
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor.
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee dan Over/under lifting di Sektor Minyak dan Gas Bumi.
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

30. Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 Tentang Modul Penerimaan Negara.
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja .
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara.
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/KM.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-07/PB/2005 Tentang Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.
40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 38 /PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Penggerjaan.
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 40 /PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER- 44 /PB/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-48/PB/2006 Tentang SP3.
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2006 Tentang Tata Cara Pembukaan Dan Pengesahan Atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah Yang Dilaksanakan Secara Langsung.
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-69/PB/2006 Tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan.
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-77/PB/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
47. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Peraturan.

48. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-02/PB/2007 Tentang Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
49. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2007 Tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
50. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB.05/2008 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.
51. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Pengenaan PBB sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
52. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-14/PB/2005 Tentang Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Perolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara.

**Rencana
Strategis**

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KEUANGAN

A.2.1. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi.

A.2.2. Misi Kementerian Keuangan

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan memiliki Misi yang terbagi dalam 5 (lima) bidang.

1. Misi Bidang Fiskal
Misi di bidang Fiskal adalah mengembangkan kebijaksanaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (*prudent*), bertanggung jawab dan transparan.
2. Misi Bidang Ekonomi
Misi di bidang Ekonomi adalah mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.
3. Misi Bidang Sosial Budaya
Misi di bidang Sosial Budaya adalah mengembangkan masyarakat finasial yang berbudaya dan modern.
4. Misi Bidang Politik
Misi di Bidang Politik adalah mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.
5. Misi Bidang Kelembagaan
Misi di Bidang Kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri (*Self Reinventing*) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembentahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang

potensional dan mempunyai integritas yang tinggi.

A.2.3. Tujuan Kementerian Keuangan

Guna mengaktualisasikan visi dan misi tersebut, maka Kementerian Keuangan menetapkan tujuan pencapaian organisasi sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara,
2. Tujuan 2 : Efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara,
3. Tujuan 3 : Optimalisasi pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit,
4. Tujuan 4 : Pemantapan sistem penganggaran, kekayaan negara dan akuntabilitas keuangan negara,
5. Tujuan 5 : Peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang,
6. Tujuan 6 : Penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat dan jaring pengaman sektor keuangan.

A.2.4. Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 memuat sasaran-sasaran program ekonomi nasional yang hendak dicapai pada tahun 2009, yang antara lain meliputi :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,6 %,
2. Pengurangan angka pengangguran menjadi 5,1 %,
3. Pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 8,2%,
4. Peningkatan daya saing dan,
5. Peningkatan investasi.

A.2.5. Strategi dan Kebijakan

1. Pendapatan Negara

Fokus Strategi di bidang pendapatan negara diarahkan pada pencapaian 4 (empat) target, yaitu optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, terwujudnya keadilan dan perlindungan masyarakat, serta citra baik Departemen Keuangan terkait dengan pelayanan publik dalam rangka peningkatan pendapatan.

Pada prinsipnya fokus strategi di bidang pendapatan negara diarahkan pada peningkatan pendapatan negara. Strategi peningkatan pendapatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kebijakan. Pertama, peningkatan target pendapatan perpajakan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan *coverage ratio* yang ada. Kedua, optimalisasi penerimaan dari bea dan cukai dengan melakukan pengkajian kelompok industri dalam rangka optimalisasi dan harmonisasi sistem pentarifan. Ketiga, peningkatan penerimaan negara bukan pajak sesuai perkembangan perekonomian dengan melakukan perbaikan regulasi.

2. Belanja Negara

Fokus strategi belanja negara diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dilakukan dalam rangka mencapai 5 (lima) target, yaitu: (a) efisiensi pengadaan barang dan jasa, (b) alokasi belanja yang tepat sasaran, (c) alokasi belanja yang berkeadilan sosial, (d) peningkatan kualitas pelayanan, dan (e) citra baik Departemen Keuangan dalam mengelola belanja negara. Pencapaian kelima target tersebut dilakukan melalui mekanisme berikut:

1. Penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif, dan efisien;
2. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil; dan
3. Pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

3. Pembiayaan Anggaran

Fokus strategi bidang pembiayaan anggaran diarahkan pada pencapaian target 5 (lima) indikator menguatnya kemampuan pembiayaan pemerintah, yaitu : (a) penurunan stok utang, (b) penggunaan utang secara selektif, (c) optimalisasi pemanfaatan hibah dan utang, (d) terwujudnya rasa aman bagi masyarakat, dan (e) citra yang baik bagi Departemen Keuangan. Capaian tertinggi yang diharapkan dari arah fokus strategi pembiayaan adalah mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi keuangan. Kondisi tersebut diyakini akan menaikkan citra Pemerintah (d.h.i. Departemen Keuangan) di mata publik. Pembentukan citra dilakukan melalui:

1. Kebijakan pembiayaan anggaran;
2. Perencanaan pembiayaan anggaran; dan
3. Pengelolaan utang pemerintah.

4. Kekayaan Negara

Kekayaan negara merupakan potensi kekuatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, fokus strategi di bidang kekayaan negara diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan penilaian kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, dalam melakukan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, penggunaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengelolaan kekayaan negara seyogianya dilakukan oleh otoritas tertentu yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Hal ini sangat penting artinya untuk menciptakan kejelasan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara.

A.2.6. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional 2004–2009, Departemen Keuangan menetapkan 15 (lima belas) program.

**REALISASI DIPA PER PROGRAM
KEMENTERIAN KEUANGAN TA 2008**

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
102	Program Pembiayaan lain-lain	-	906.289.163.569	0,00
109	Program penerapan kepemerintahan yang baik	10.073.755.323.500	7.941.330.846.230	78,83
110	Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.	46.428.245.000	28.935.451.846	62,32
113	Pengelolaan sumber daya manusia aparatur.	176.284.273.000	133.187.966.278	75,55
117	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara.	1.193.895.759.000	921.761.103.322	77,21
120	Program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara.	2.420.303.198.500	1.609.641.050.527	66,51
121	Program peningkatan efektivitas pengeluaran negara.	521.128.648.000	180.953.768.883	34,72
122	Program pembinaan akuntansi keuangan negara.	24.045.990.000	17.073.572.285	71,00
123	Program pengembangan kelembagaan keuangan.	51.974.302.000	41.334.905.975	79,53
124	Program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan.	309.339.836.000	45.282.689.386	14,64
125	Program pengelolaan dan pembiayaan hutang.	38.196.186.000	27.502.271.124	72,00
126	Program pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran.	4.048.933.000	3.294.972.000	81,38
128	Program pengembangan komunikasi dan informasi dan hubungan antar lembaga	249.866.177.000	182.850.512.784	73,18
501	Program pendidikan kedinasan.	12.657.077.104	11.660.001.265	92,12
Jumlah		15.121.923.948.104	12.051.098.275.474	79,69

Pendapatan

PENDAPATAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PENDAPATAN DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan TA 2008 adalah sebesar Rp917.771.650.024.199,00 atau 108,96 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp842.334.825.630.945,00. Dibandingkan dengan TA 2007, realisasi pendapatan TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp269.458.467.117.703,00 atau 41,56 persen.

Belanja

BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan pada TA 2008 adalah sebesar Rp12.051.098.275.474,00 atau 79,69 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp15.121.923.948.104,00. Realisasi belanja TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp5.051.899.436.0586,00 atau 72,18 persen dari realisasi belanja TA 2007 sebesar Rp6.999.198.838.888,00.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2008 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan TA 2008 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp15.121.923.948.104,00 meliputi:

- Satuan kerja pusat/KP termasuk 1 satker BLU PIP sebesar Rp10.414.710.814.632,00.
- Satuan kerja daerah/KD termasuk 1 satker BLU STAN sebesar Rp4.707.213.133.472,00.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Jenis Sumber Dana	
		APBN	BLU
2007	1	-	15.138.805.000
2008	2	20.816.292.304	15.810.089.104

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.031 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 1.030 satker (99,90 %), yang tidak menyampaikan laporan keuangan sejumlah 1 satker (0,10 %) karena telah ditutup pada tahun 2008. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
		KP		KD		DK		TP			
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
01	Sekretariat Jenderal	5	-	20	-	-	-	-	-	25	
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
04	Ditjen Pajak	1	-	543	-	-	-	-	-	544	
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	137	1	-	-	-	-	143	

06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	-	211
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	-	88
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	BPPK	1	-	13	-	-	-	-	-	-	14
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	22	-	1008	1*)	-	-	-	-	-	1031

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

*) = KPBC Kalabahi tidak menyampaikan laporan keuangan karena sudah tidak beroperasi lagi.

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 Kementerian Keuangan juga mengelola dana yang berasal dari BA 062 (Subsidi dan Transfer) sebesar Rp252.347.219.100.000,00 dan BA 069 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp40.496.472.754.000,00.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.031 satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan BMN dan dikonsolidasikan sejumlah 1.030 satker (99,90 %), yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 1 satker (0,10 %) karena telah ditutup pada tahun 2008. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
		KP		KD		DK		TP			
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
01	Sekretariat Jenderal	5	-	20	-	-	-	-	-	25	
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
04	Ditjen Pajak	1	-	543	-	-	-	-	-	544	
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	137	1	-	-	-	-	143	
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	211	
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	88	
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
11	BPPK	1	-	13	-	-	-	-	-	14	
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Jumlah	22	-	1008	1*)	-	-	-	-	1031	

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

**Kebijakan
Akuntansi**

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK TA 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Keuangan adalah :

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) dan PNBP pertambangan panas bumi yang masing-masing ditampung dalam Rekening Departemen Keuangan Khusus Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (rekening 600.000411) dan Rekening Penerimaan Panas Bumi (rekening 508.000084). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai karena penerimaan migas pada rekening 600.000411 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti pembayaran PBB, *reimbursement* PPN, pembayaran Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD), *fee* kegiatan hulu migas, *over/under lifting* dan Domestic Market Operation (DMO) *fee*. Sementara itu, penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084 harus diperhitungkan dengan kewajiban *reimbursement* PPN dan pembayaran PBB.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan

atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh melalui pembelian,
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka

panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk surat berharga pada BUMN dalam rangka penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang

direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Aset lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan BLU dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh

bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Dana Kelolaan BLU adalah bagian dari dana yang disediakan pada PIP, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan sebagai pinjaman kepada pihak lain atau belum diinvestasikan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN DAN HIBAH

Realisasi pendapatan Rp917.771.650.024.199,00

Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan pada TA 2008 adalah sebesar Rp917.771.650.024.199,00 atau 108,96 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp842.334.825.630.945,00. Dibandingkan dengan TA 2007, realisasi pendapatan TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp269.458.467.117.702,00 atau 41,56 persen. Kenaikan ini berasal dari Penerimaan Perpjakan sebesar Rp167.365.164.743.721,00 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp102.093.302.373.980,00.

Kenaikan penerimaan perpjakan paling besar terjadi pada pendapatan PPh sebesar Rp88.615.362.189.856,00 dan PPN sebesar Rp55.727.635.787.665,00.

Kenaikan yang sangat signifikan untuk Pendapatan PNBP terjadi pada pendapatan Minyak Bumi sebesar Rp75.417.775.440.158,00 atau 80,57 persen dari realisasi TA 2007, kenaikan realisasi penerimaan tersebut disebabkan oleh:

- Realisasi beberapa indikator ekonomi makro yang berada di atas asumsi makro APBN-P 2008;
- Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama periode Desember 2007 s.d. November 2008 tercatat sebesar USD 101,31/barrel, sementara rata-rata ICP selama periode Januari s.d. Desember 2008 adalah sebesar USD 96,78/barrel. Angka tersebut berada di atas asumsi ICP dalam APBN-P yang ditetapkan sebesar USD 95/barrel;
- Realisasi *lifting* selama tahun 2008 (Desember 2007 s.d. November 2008) mencapai 931,16 ribu barrel per hari, berada di atas asumsi APBN-P yang ditetapkan sebesar 927 ribu barrel per hari.

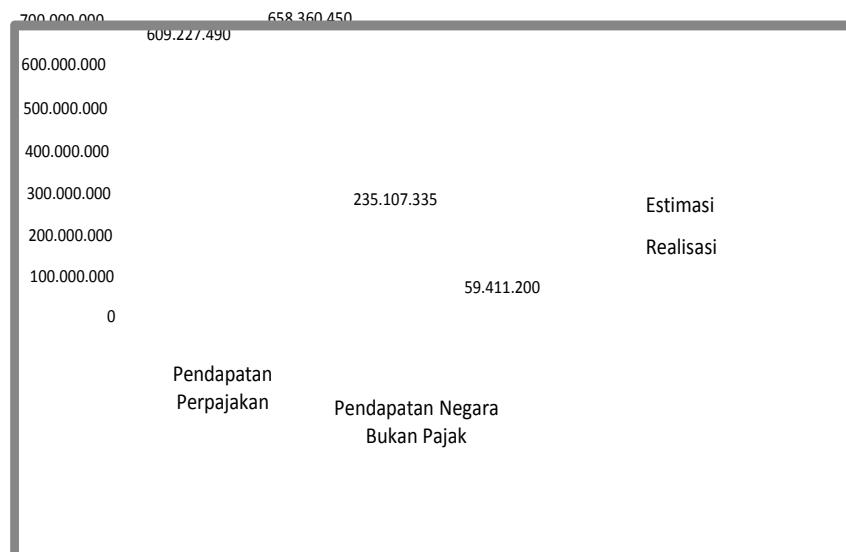
Perbandingan realisasi pendapatan dengan estimasi pendapatan

Perbandingan realisasi pendapatan dengan estimasi pendapatan Tahun Anggaran 2008 dapat dilihat pada tabel 3 dan grafik 1 berikut.

Tabel 3
Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

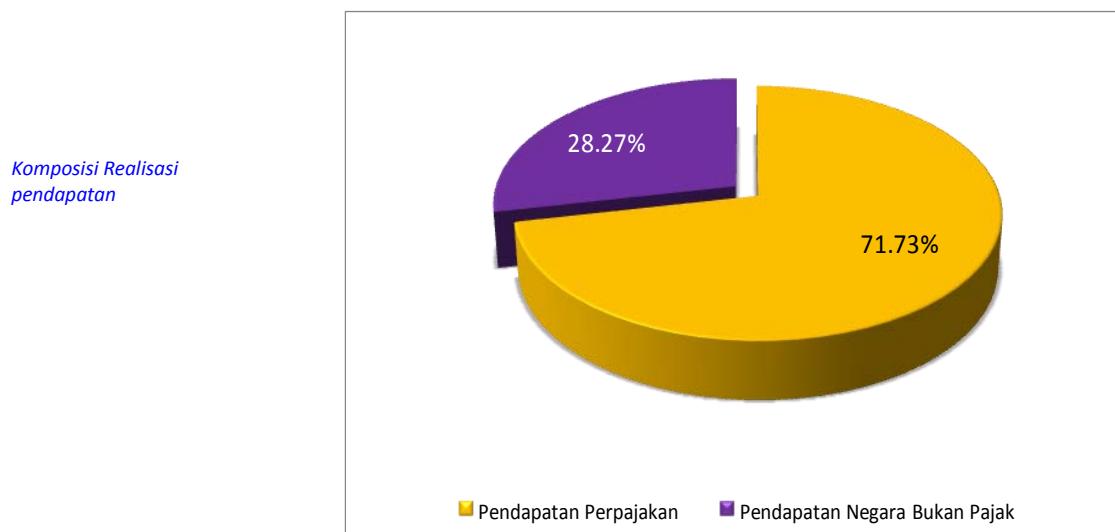
Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Perpjakan	607.227.490.000.000	658.360.450.104.268	108,42%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	580.248.290.000.000	622.219.647.387.304	107,23%
Pend. Pajak Perdagangan Internasional	26.979.200.000.000	36.140.802.716.964	133,96%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	235.107.335.630.945	259.411.199.919.931	110,34%
Total Pendapatan	842.334.825.630.945	917.771.650.024.199	108,96%

Grafik 1
Perbandingan Estimasi Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2008
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2008 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut.

Grafik 2
Komposisi Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2008



Perbandingan antara realisasi pendapatan tahun 2008 dan 2007 dapat dilihat pada *Catatan atas Laporan Keuangan* halaman 22

tabel 4 berikut.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Perpjakan	658.360.450.104.268	490.995.285.360.546	167.365.164.743.722	34,09%
Pend. Pajak Dalam Negeri	622.219.647.387.304	470.058.411.279.578	152.161.236.107.726	32,37%
Pend. Pajak Perdagangan Internasional	36.140.802.716.964	20.936.874.080.968	15.203.928.635.996	72,62%
Pend. Negara Bukan Pajak	259.411.199.919.931	157.317.897.545.951	102.093.302.373.980	64,90%
Total Pendapatan	917.771.650.024.199	648.313.182.906.497	269.458.467.117.702	41,56%

B.1.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PER ESELON I

Realisasi pendapatan per Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

No.	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
1	SETJEN	127.050.323.000	355.316.911.346	279,67%
2	ITJEN	44.440.000	320.707.707	721,66%
3	DJA	245.939.690.000.000	272.145.639.840.212	110,66%
4	DJP	534.535.380.328.342	571.015.136.834.249	106,82%
5	DJBC	61.597.705.731.864	74.029.415.541.789	120,18%
6	DJPK	0	36.598.160	0,00%
7	DJPU	0	25.952.115	0,00%
8	DJPPB	2.092.733.717	12.354.826.014	590,37%
9	DJKN	74.219.336.386	114.843.204.866	154,73%
10	BAPEPAM DAN LK	40.001.200.000	84.306.705.259	210,76%
11	BPPK	18.641.537.636	14.197.109.726	76,16%
12	BKF	0	55.792.756	0,00%
JUMLAH		842.334.825.630.945	917.771.650.024.199	108,96%

B.1.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI PENDAPATAN

Penerimaan Kementerian Keuangan terdiri dari (1) Penerimaan Perpjakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan TA 2008 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Perpajakan	607.227.490.000.000	658.360.450.104.268	108,42%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	235.107.335.630.945	259.411.199.919.931	110,34%
Total Pendapatan	842.334.825.630.945	917.771.650.024.199	108,96%

B.1.2.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2008 adalah sebesar 658.360.450.104.268,00 atau 108,42 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp607.227.490.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2007 berarti lebih tinggi sebesar Rp167.365.164.743.722,00 atau 34,09 persen. Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional.

Perbandingan antara realisasi Pendapatan Perpajakan TA 2008 dan 2007 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

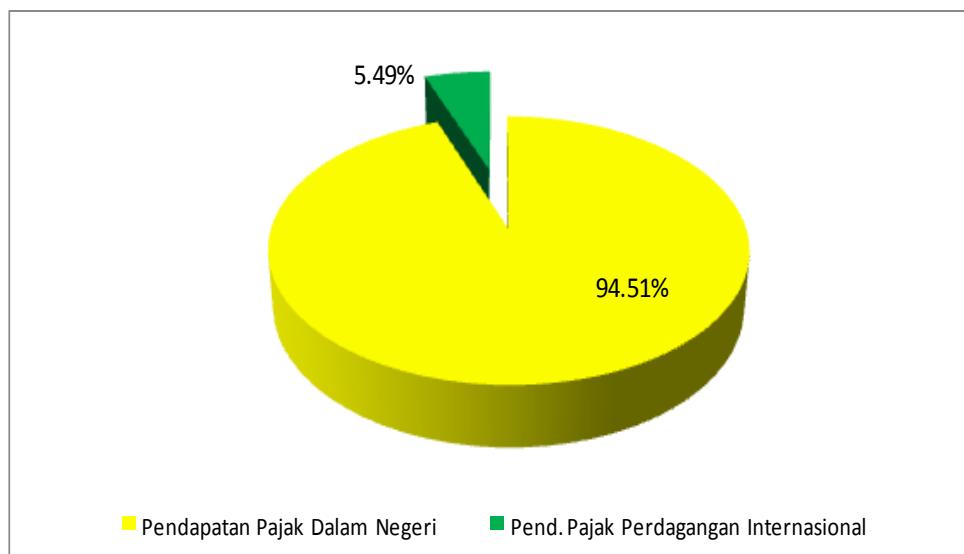
Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
Rp658.360.450.104.
268,00

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan Per Jenis Penerimaan
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Perpajakan	658.360.450.104.267	490.995.285.360.546	167.365.164.743.721	34,09%
<i>Pendapatan Pajak Dalam Negeri</i>	<i>622.219.647.387.303</i>	<i>470.058.411.279.578</i>	<i>152.161.236.107.725</i>	<i>32,37%</i>
PPH	327.072.030.881.319	238.456.668.691.463	88.615.362.189.856	37,16%
PPN	210.252.844.791.599	154.525.209.003.934	55.727.635.787.665	36,06%
PBB	25.184.321.344.203	23.712.069.300.670	1.472.252.043.533	6,21%
BPHTB	5.464.842.964.798	5.947.294.662.224	(482.451.697.426)	(8,11%)
Cukai	51.212.399.482.354	44.679.463.855.018	6.532.935.627.336	14,62%
Pendapatan Pajak Lainnya	3.033.207.923.030	2.737.705.766.269	295.502.156.761	10,79%
<i>Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional</i>	<i>36.140.802.716.964</i>	<i>20.936.874.080.968</i>	<i>15.203.928.635.996</i>	<i>72,62%</i>
Bea Masuk	22.587.132.963.232	16.699.497.919.093	5.887.635.044.139	35,26%
Pungutan Ekspor	13.553.669.753.732	4.237.376.161.875	9.316.293.591.857	219,86%

Komposisi realisasi Pendapatan Perpajakan TA 2008 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada grafik 3 berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Pendapatan Perpajakan per Jenis Penerimaan
Tahun Anggaran 2008



Meningkatnya Penerimaan Perpajakan sejalan dengan upaya Pemerintah meningkatkan *tax ratio* yaitu peningkatan penerimaan perpajakan dan rasionalitas terhadap PDB melalui langkah-langkah yang dilakukan sejak tahun 2006, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pada sistem perpajakan diantaranya dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan administrasi perpajakan.

Walaupun telah ditargetkan secara cermat, realisasi APBN juga dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait di mana pada gilirannya memiliki implikasi pada berbagai kondisi perekonomian secara makro. Berbagai capaian/realisasi APBN baik di sisi pendapatan maupun belanja tahun 2008 memiliki implikasi yang signifikan bagi perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi. Capaian realisasi penerimaan perpajakan TA 2008 sebesar Rp658,40 triliun secara signifikan mempengaruhi upaya peningkatan kinerja Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpajakan selaku *budgeter*, untuk membiayai kegiatan publik dan sebagai *regulator*, dimana Pemerintah dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Realisasi penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 adalah sebesar Rp36.140.802.716.964,00 atau naik 72,62 persen dari realisasi TA 2007 sebesar Rp20.936.874.080.968,00. Sedangkan realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2008 adalah sebesar Rp622.219.647.387.304,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp152.161.236.107.726,00 atau naik 32,37 persen dibanding realisasi TA 2007 yang besarnya Rp470.058.411.279.578,00. Penerimaan Pajak Dalam Negeri tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan semua jenis pajak yang mengindikasikan terus membaiknya kondisi perekonomian dan reformasi perpajakan yang mulai menunjukkan hasilnya.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan respon Pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan (*fairness*), kesederhanaan (*simplicity*), netralitas (*neutrality*), dan kepastian hukum (*legal*). Di

samping itu, terbitnya Undang-Undang pada bulan Juli tahun 2007 tersebut mencerminkan upaya serius Pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip *good governance* terutama kaitannya dengan prinsip penegakan hukum serta prinsip efektivitas dan efisiensi ekonomi.

Seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, tujuan dari perubahan adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu perubahan juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kebijakan pokok tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
3. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
4. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
5. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
6. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
7. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
8. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
9. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Walaupun relatif baru, ketentuan perpajakan ini telah dan berpotensi signifikan untuk memberikan dampak masif bagi perekonomian Indonesia secara makro. Dari hasil survei yang dilakukan World Bank, Indonesia berada pada peringkat 110 dari 178 negara dalam hal kemudahan membayar pajak pada periode tahun 2006 s.d. 2007 (www.doingbusiness.org). Melalui reformasi perpajakan, *high cost economy* yang harus dibayar oleh dunia bisnis di Indonesia diharapkan dapat dieliminasi untuk menstimulasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri UU No. 28 tahun 2007 tersebut telah memfasilitasi jalan (*pave the way*) menuju sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif. Di masa yang akan datang, perubahan sistem perpajakan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan tujuan kebijakan perpajakan itu sendiri, yakni menghasilkan pendapatan untuk membiayai kegiatan publik, sebagai sarana distribusi pendapatan dan pembuatan kebijakan Pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

(Sumber: UU No. 28/2007)

Secara nominal kinerja penerimaan perpajakan TA 2008 lebih baik dibandingkan TA 2007. Pada tahun ini realisasi penerimaan pajak mencapai Rp658,40 triliun dari target sebesar Rp607,22 triliun, lebih besar dari realisasi tahun 2007 sebesar Rp490,99 triliun dari target sebesar Rp492,01 triliun.

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2008 mencapai 108,42 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P. Tercapainya target pendapatan perpajakan terutama disumbangkan oleh PPh Migas yang mencapai Rp77,12 triliun atau 143,74 persen dari

target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp53,64 triliun. Disamping itu tercapai pula realisasi Pajak Penghasilan Non Migas mencapai Rp249,32 triliun atau 103,01 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa sektor migas masih memegang peranan penting dalam penerimaan perpajakan di Indonesia.

Realisasi penerimaan pajak tersebut di atas ditentukan oleh beberapa faktor penentu, yaitu indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Selain itu penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak internasional yang memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dari sektor migas. Hal ini antara lain disebabkan oleh realisasi beberapa indikator ekonomi makro yang berada di atas asumsi makro APBN-P 2008.

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama periode Desember 2007 s.d. November 2008 tercatat sebesar USD 101,31/barrel, sementara rata-rata ICP selama periode Januari s.d. Desember 2008 adalah sebesar USD 96,78/barrel. Angka tersebut berada di atas asumsi ICP dalam APBN-P yang ditetapkan sebesar USD 95/barrel.

Realisasi *lifting* selama tahun 2008 (Desember 2007 s.d. November 2008) mencapai 931,16 ribu barrel per hari, berada di atas asumsi APBN-P yang ditetapkan sebesar 927 ribu barrel per hari.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, Pemerintah melaksanakan penyempurnaan administrasi perpajakan. Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki administrasi perpajakan dalam mengatasi rendahnya rasio pajak dipengaruhi oleh (i) sistem perpajakan yang rumit dan kecenderungan terjadinya tumpang-tindih peraturan; (ii) tendensi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya; (iii) dan kondisi perekonomian yang didominasi sektor informal. Upaya nyata yang saat ini sedang dilakukan adalah perubahan UU perpajakan, yaitu UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Tercapainya prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan, dan keadilan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan merangsang perkembangan ekonomi makro yang lebih baik dengan menghapuskan hambatan berinvestasi.

Sesuai dengan UU No.28/2007 tersebut, hingga tahun 2008 telah dilaksanakan reformasi administrasi perpajakan. Refromasi tersebut meliputi peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, yang meliputi implementasi dan pembentukan sistem administrasi perpajakan modern pada seluruh Satker Ditjen Pajak (KPP Modern: *Large Tax Office, Medium Tax Office, dan Small Tax Office*), serta perluasan wajib pajak patuh ditambah wajib pajak tertentu untuk percepatan pemberian restitusi; dan implementasi praktek *good governance*, meliputi pembentukan Pusat Data Pajak dan *e-system*, serta pembentukan dan implementasi manajemen SDM modern.

Kenaikan realisasi penerimaan bea masuk dan cukai terutama dipengaruhi oleh perkembangan indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi. Selain itu kenaikan penerimaan cukai juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah produksi barang kena cukai serta tarif dan Harga Jual Eceran (HJE) produk Hasil Tembakau. Upaya peningkatan efektivitas pemungutan cukai juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan cukai.

B.1.2.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008 adalah sebesar Rp622.219.647.387.304,00 atau 107,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp580.248.290.000.000,00. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp152.161.236.107.726,00 atau 32,37 persen dari realisasi TA 2007.

*Realisasi
Pendapatan Pajak
Dalam Negeri
Rp622.219.647.387.
304,00*

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri dengan estimasi pendapatan TA 2008 dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8

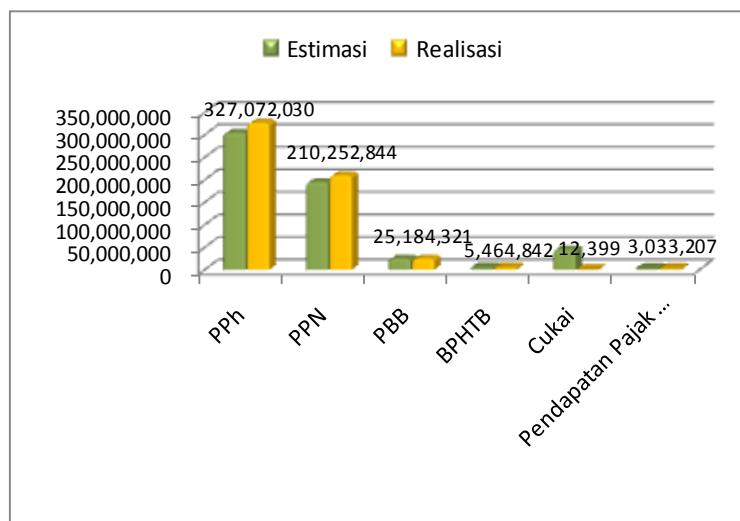
**Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008
(dalam rupiah)**

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	580.248.290.000.000	622.219.647.387.303	107,23
PPH	305.015.890.000.002	327.072.030.881.319	107,23
PPN	195.463.999.999.999	210.252.844.791.599	107,57
PBB	25.266.000.000.000	25.184.321.344.203	99,68
BPHTB	5.431.200.000.000	5.464.842.964.798	100,62
Cukai	45.717.500.000.000	51.212.399.482.354	112,02
Pendapatan Pajak Lainnya	3.353.699.999.999	3.033.207.923.030	90,44

Seluruh satuan kerja Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membukukan pendapatan cukai sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara dokumen sumber di Seksi Cukai, pencatatan pada Seksi Perbendaharaan, dan rekapitulasi sistem aplikasi dari Seksi Dukungan Teknik dan Distribusi Dokumen (DTDD).

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri dengan estimasi pendapatan dapat dilihat pada grafik 4 berikut.

**Grafik 4
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008
(dalam jutaan rupiah)**



Perbandingan antara realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

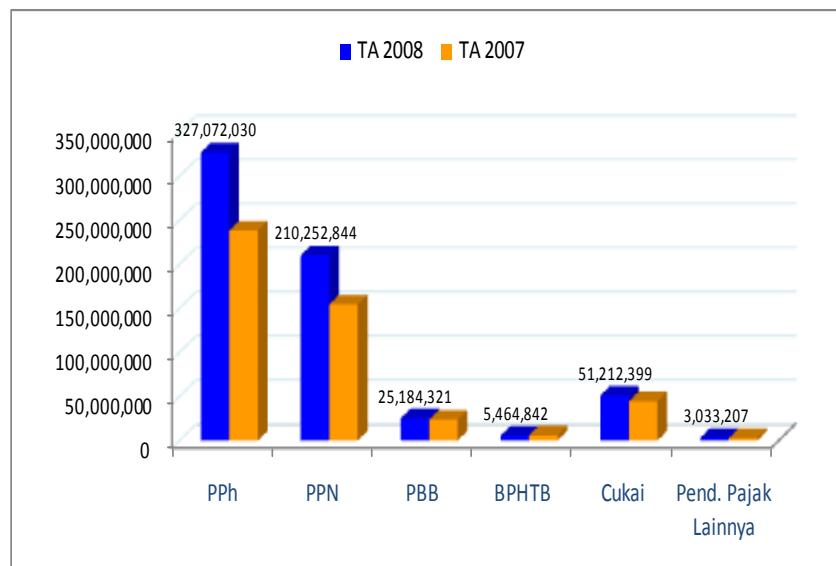
Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

*Perbandingan
realisasi
pendapatan pajak
Dalam Negeri*

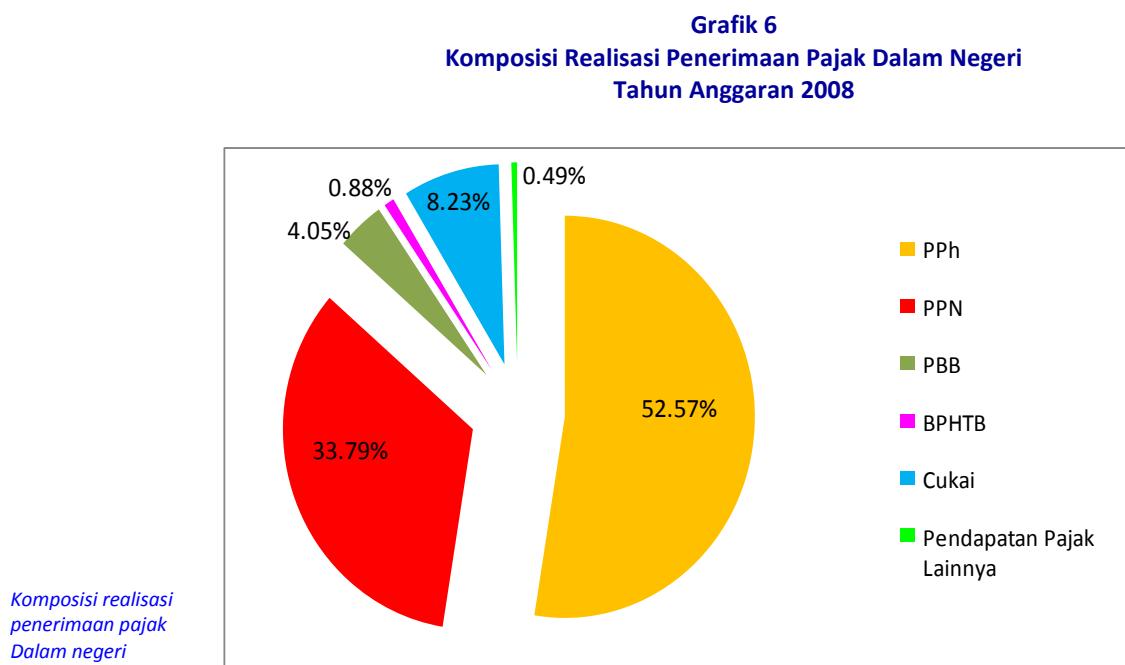
Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Pend. Pajak Dalam Negeri	622.219.647.387.303	470.058.411.279.578	152.161.236.107.725	32,37%
PPh	327.072.030.881.319	238.456.668.691.463	88.615.362.189.856	37,16%
PPN	210.252.844.791.599	154.525.209.003.934	55.727.635.787.665	36,06%
PBB	25.184.321.344.203	23.712.069.300.670	1.472.252.043.533	6,21%
BPHTB	5.464.842.964.798	5.947.294.662.224	(482.451.697.426)	(8,11%)
Cukai	51.212.399.482.354	44.679.463.855.018	6.532.935.627.336	14,62%
Pendapatan Pajak Lainnya	3.033.207.923.030	2.737.705.766.269	295.502.156.761	10,79%

Perbandingan antara realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada grafik 5 berikut.

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2008 dapat dilihat pada grafik 6 berikut.



B.1.2.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 adalah sebesar Rp36.140.802.716.964,00 atau 133,96 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp26.979.200.000.000,00. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp15.203.928.635.996,00 atau 72,62 persen dari realisasi TA 2007. Besarnya realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

*Realisasi
Pendapatan Pajak
perdagangan
Internasional
Rp36.140.802.716.9
64,00*

Tabel 10
Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pend. Pajak Perdagangan Internasional	26.979.200.000.000	36.140.802.716.964	133,96%
Pendapatan Bea Masuk	15.820.900.000.000	22.587.132.963.232	142,77%
Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor	11.158.300.000.000	13.553.669.753.732	121,47%

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Bea Masuk	22.587.132.963.232	16.699.497.919.093	5.887.635.044.139	35,26%
Pungutan Ekspor	13.553.669.753.732	4.237.376.161.875	9.316.293.591.857	219,86%
Total	36.140.802.716.964	20.936.874.080.968	15.203.928.635.996	72,62%

Realisasi penerimaan Bea Masuk selama TA 2008 tercatat sebesar Rp22.587.132.963.232,00 atau 142,77 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp15.820.900.000.000,00. Hal ini berarti Penerimaan Bea Masuk TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp5.887.635.044.139,00 atau 35,26 persen dari realisasi TA 2007.

Seluruh satuan kerja (KPPBC) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membukukan pendapatan Bea Masuk yang mengacu pada prinsip *Cash Basis*. Hal ini dilakukan dengan melakukan *cut off* atau mengeluarkan pendapatan yang SSPCP-nya tahun 2007 tetapi PIB-nya tahun 2008 dan membukukan pendapatan yang SSPCP-nya tahun 2008 tetapi PIB-nya tahun 2009.

Realisasi penerimaan Pungutan Ekspor/bea keluar selama TA 2008 tercatat sebesar Rp13.553.669.753.732,00 atau 121,47 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp11.158.300.000.000,00. Hal ini berarti Penerimaan Bea Keluar/Pungutan Ekspor TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp9.316.293.591.857,00 atau 219,86 persen dari realisasi TA 2007.

Terlampaunya target penerimaan Pungutan Ekspor/bea keluar antara lain disebabkan oleh tingginya harga komoditas ekspor, terutama *Crude Palm Oil* (CPO), yang berimplikasi pada penerapan tarif Pungutan Ekspor/bea keluar yang lebih tinggi. Disamping itu, membaiknya harga CPO tersebut turut memberikan insentif kepada eksportir untuk meningkatkan volume penjualan CPO ke luar negeri. Dengan naiknya harga dan volume tersebut, maka nilai Pungutan Ekspor/bea keluar ikut meningkat pula. Hal ini karena pengenaan tarif Pungutan Ekspor/bea keluar atas komoditas ekspor berdasarkan tarif progresif, sehingga makin tinggi nilai ekspor, makin besar pula Pungutan Ekspor/bea keluar yang harus disetor ke kas negara.

Selama TA 2008 terdapat realisasi pengembalian pendapatan Pungutan Ekspor/bea keluar untuk pendapatan TA 2008 melalui kompensasi Pungutan Ekspor/bea keluar Tahun 2008 sebesar Rp21.644.851.705,42. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pungutan Ekspor, kompensasi tersebut diakui sebagai pembayaran diterima di muka atas jumlah Pungutan Ekspor yang terutang dari eksportir yang bersangkutan pada periode berikutnya dan disajikan sebagai utang di neraca tingkat Eselon I Ditjen Anggaran.

Realisasi pengembalian Pungutan Ekspor/bea keluar melalui kompensasi dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12
Daftar Pengembalian Pendapatan Bea Keluar Melalui Kompenasi
Tahun Anggaran 2008

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan/ Tanggal Surat	Nilai
1	PT. Sari Dumai Sejati	KEP-39/KM.02/2008 Tgl.27 Agustus 2008	253,806,307.86
2	KPB PTPN Cabang Medan	KEP-43/KM.02/2008 Tgl.16 September 2008	12,158,164.00
3	PT. Kalirejo Lestari	KEP-47/KM.02/2008 Tgl.23 September 2008	1516,491,900.00
4	PT. Salim Ivomas Pratama	KEP-46/KM.02/2008 Tgl.22 September 2008	202,241,783.00
5	PT. Sutomo Agrindo Mas	KEP-56/KM.02/2008 Tgl.21 Oktober 2008	1516,491,900.00
6	PT. Sinar Jaya Inti Mulya	KEP-59/KM.02/2008 Tgl.22 Oktober 2008	1998,721,159.00
7	PT. Pacific Palmindo Industri	KEP-54/KM.02/2008 Tgl.21 Oktober 2008	168,528,582.00
8	PT. Salim Ivomas Pratama	KEP-58/KM.02/2008 Tgl.22 Oktober 2008	83,608,048.00
9	PT. Salim Ivomas Pratama	KEP-57/KM.02/2008 Tgl.22 Oktober 2008	227,117,484.00
10	PT. Hindoli	KEP-65/KM.02/2008 Tgl.05 November 2008	739,513,441.00
11	PT. Smart Tbk.	KEP-64/KM.02/2008 Tgl.05 November 2008	21,296,423.95
12	PT. Intibenua Perkasatama	KEP-63/KM.02/2008 Tgl.05 November 2008	58,238,104.00
13	PT. Salim Ivomas Pratama	KEP-66/KM.02/2008 Tgl.05 November 2008	36,223,129.00
14	KPB PTPN Cabang Medan	KEP-68/KM.02/2008 Tgl.12 November 2008	800,056,980.00
15	PT. Socfin Indonesia	KEP-76/KM.02/2008 Tgl.24 Desember 2008	9,276,802,568.61
16	PT. Musim Mas	KEP-73/KM.02/2008 Tgl.22 Desember 2008	208,506,168.00
17	PT. Intibenua Perkasatama	KEP-72/KM.02/2008 Tgl.22 Desember 2008	266,565,176.00
18	PT. Multimas Nabati Asahan	KEP-78/KM.02/2008 Tgl.30 Desember 2008	385,882,560.00
19	PT. Karya PutraKreasi Nusantara	KEP-77/KM.02/2008 Tgl.24 Desember 2008	40,156,642.00
20	PT. Bukit Kapur Reksa	KEP-82/KM.02/2008 Tgl.31 Desember 2008	116,000,280.00
21	PT. Musim Mas	KEP-83/KM.02/2008 Tgl.31 Desember 2008	733,079,352.00
22	PT. Tri Bakti Sarimas	KEP-81/KM.02/2008 Tgl.30 Desember 2008	455,369,216.00
23	PT. Smart Tbk.	KEP-80/KM.02/2008 Tgl.30 Desember 2008	71,166,590.00
24	PT. Binapratama Sakatojaya	KEP-79/KM.02/2008 Tgl.30 Desember 2008	626,641,488.00
25	PT. Selago Makmur Plantation	KEP-75/KM.02/2008 Tgl.24 Desember 2008	469,981,116.00
26	PT. Ecco Tannery Indonesia	KEP-31/KM.02/2008 Tgl.18 Juli 2008	1,200,089,075.00
27	PT. Nubika Jaya	KEP-45/KM.02/2008 Tgl.16 September 2008	43,447,615.00
28	PT. Daya Labuhan	KEP-67/KM.02/2008 Tgl.11 Mei 2008	116,670,453.00
JUMLAH			21,644,851,705.42

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, penatausahaan penerimaan bea keluar yang semula menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran, dialihkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009, pengelolaan penerimaan Pungutan Ekspor/bea keluar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

B.1.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2008 adalah sebesar Rp259.411.199.919.931,00 atau 110,34 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp235.107.335.630.945,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2007, PNBP TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp102.093.302.373.980,00 atau

64,90 persen dari realisasi TA 2007. Kenaikan realisasi PNBP ini terjadi pada Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp87.774.684.088.340,00 atau 70,34 persen, peningkatan Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp5.865.867.583.870,00 atau 25,26 persen, dan peningkatan Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp8.411.751.883.988,00 atau 90,34 persen.

Realisasi PNBP
Rp259.411.199.919.
931,00

PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya; dan (iv) Pendapatan Badan Layanan Umum. Besarnya realisasi PNBP TA 2008 adalah dapat dilihat dalam tabel 13 berikut.

Tabel 13
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2008
(dalam rupiah)

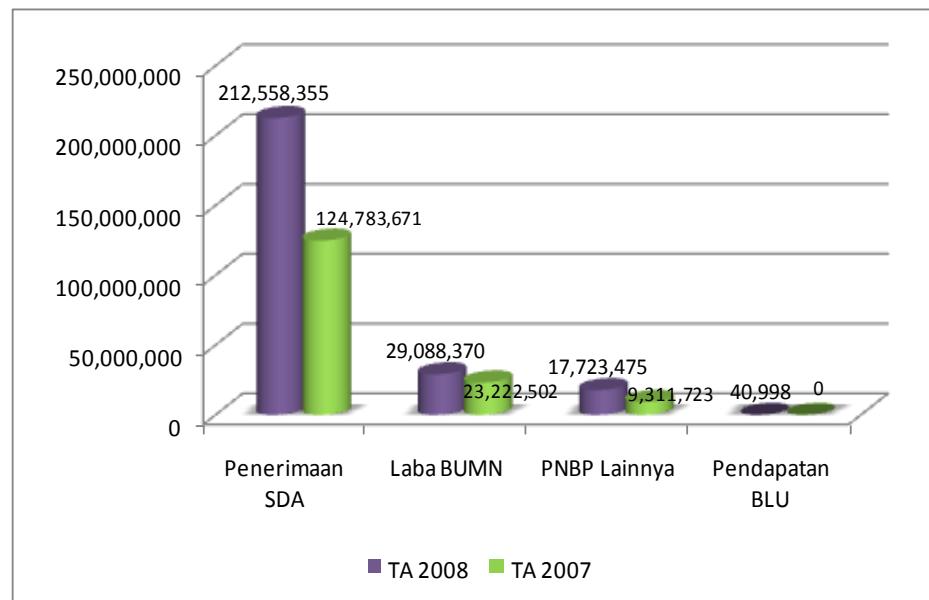
Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Sumber Daya Alam	182.946.860.000.000	212.558.355.630.060	116,19%
Pendapatan Bagian Laba BUMN	31.244.300.000.000	29.088.370.115.749	93,10%
Pendapatan PNBP Lainnya	20.793.523.349.183	17.723.475.356.340	85,24%
Pendapatan BLU	122.619.663.000	40.998.817.782	33,44%
	235.107.303.012.183	259.411.199.919.931	110,34%

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 14 dan grafik 7 berikut.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

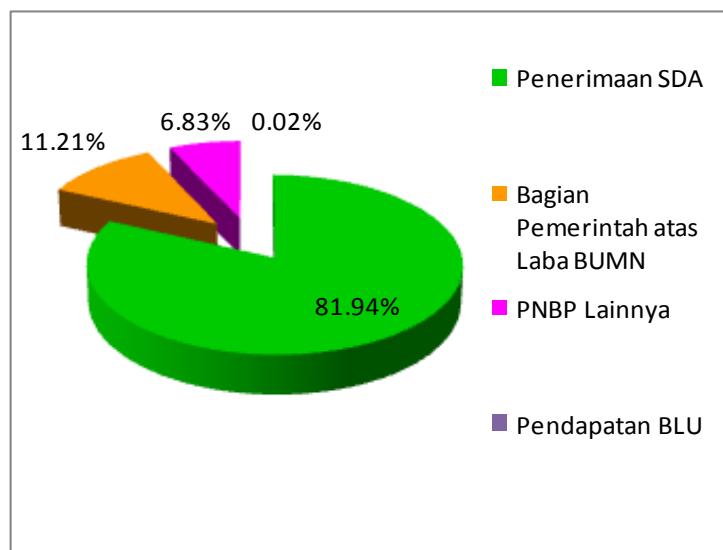
Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Penerimaan SDA	212.558.355.630.060	124.783.671.541.720	87.774.684.088.340	70,34%
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	29.088.370.115.749	23.222.502.531.879	5.865.867.583.870	25,26%
PNBP Lainnya	17.723.475.356.340	9.311.723.472.352	8.411.751.883.988	90,34%
Pendapatan BLU	40.998.817.782	0	40.998.817.782	0,00%
Total Pendapatan	259.411.199.919.931	157.317.897.545.951	102.093.302.373.980	64,90%

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Grafik 8
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2008



B.1.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2008 adalah sebesar Rp212.558.355.630.060,00 atau 116,19 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp182.946.860.000.000,00. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp87.774.684.088.340,00 atau 70,34 persen dari realisasi TA 2007. Kontribusi kenaikan Penerimaan SDA ini terutama berasal dari Pendapatan Minyak Bumi yang naik sangat signifikan yaitu sebesar Rp75.417.775.440.158,00 atau 80,57 persen dari TA 2007.

Tercapainya target penerimaan SDA migas pada tahun 2008 antara lain disebabkan oleh realisasi beberapa indikator ekonomi makro yang berada di atas asumsi makro APBN-P 2008.

*Realisasi
Penerimaan SDA
Rp212.558.355.630.
060,00*

Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) selama periode Desember 2007 s.d. November 2008 tercatat sebesar USD 101,31/barrel, sementara rata-rata ICP selama periode Januari s.d. Desember 2008 adalah sebesar USD 96,78/barrel. Angka tersebut berada di atas asumsi ICP dalam APBN-P yang ditetapkan sebesar USD 95/barrel.

Realisasi *lifting* selama tahun 2008 (Desember 2007 s.d. November 2008) mencapai 931,16 ribu barrel per hari, berada di atas asumsi APBN-P yang ditetapkan sebesar 927 ribu barrel per hari.

Krisis keuangan global yang dipicu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat, satu dan lain hal telah memperlemah nilai tukar rupiah terhadap USD, terutama pada triwulan IV/2008.

Melambungnya harga minyak mentah dunia, membaiknya *lifting*, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD tersebut di atas telah mendorong pencapaian penerimaan SDA di atas target APBN-P. Disamping itu, pencapaian tersebut didorong pula oleh adanya upaya penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Besarnya realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam dapat dilihat dalam tabel 15 berikut.

Tabel 15
Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Minyak Bumi	149.111.310.000.000	169.022.232.949.516	113,35%
Pendapatan Gas Bumi	33.835.550.000.000	42.594.738.596.246	125,89%
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	0	941.384.084.298	0,00%
Total	182.946.860.000.000	212.558.355.630.060	116,19%

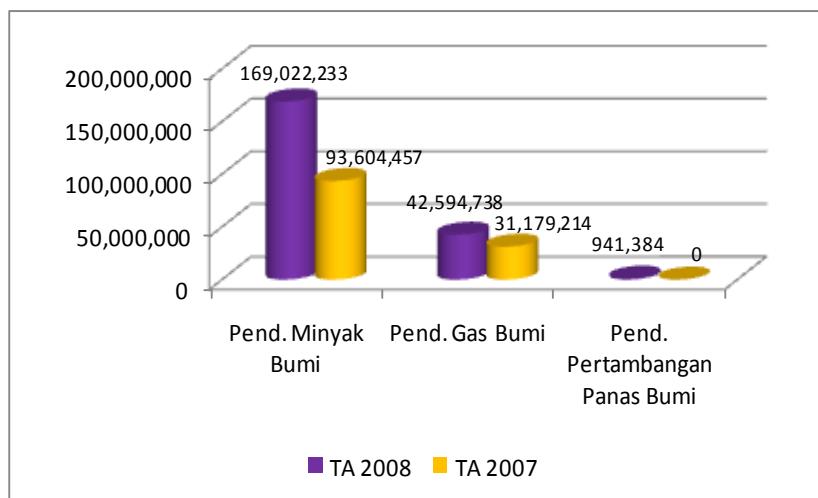
Perbandingan antara realisasi Penerimaan SDA TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 16 dan grafik 9 berikut.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Minyak Bumi	169.022.232.949.516	93.604.457.509.358	75.417.775.440.158	80,57%
Pendapatan Gas Bumi	42.594.738.596.246	31.179.214.032.362	11.415.524.563.884	36,61%
Pend. Pertambangan Panas Bumi	941.384.084.298	0	941.384.084.298	0,00%
Total Pendapatan	212.558.355.630.060	124.783.671.541.720	87.774.684.088.340	70,34%

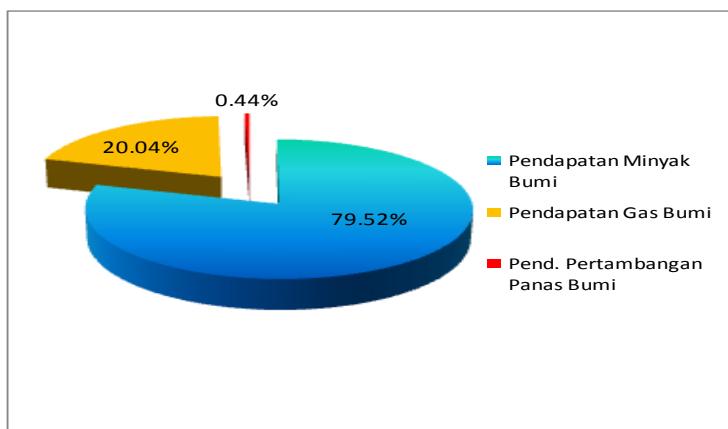
Grafik 9
Perbandingan Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)

*Perbandingan
Realisasi
Penerimaan SDA*



Komposisi realisasi Penerimaan SDA dapat dilihat pada Grafik 10 berikut.

Grafik 10
Komposisi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam
Tahun Anggaran 2008



Pendapatan Pertambangan Panas Bumi (SDA Non Migas)

Penyajian Pendapatan Pertambangan Panas Bumi pada Tahun 2008 didasarkan pada ketentuan PMK Nomor 165/PMK.03/2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik. Pada tahun sebelumnya informasi mengenai Pendapatan Pertambangan Panas Bumi hanya disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berupa Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran pada Rekening Nomor 508.000084 sebagai rekening antara.

Rekening No.508.000084 adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Departemen Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha Panas Bumi.

Berdasarkan surat Dirjen Anggaran kepada Dirjen Perbendaharaan No. S-4160/AG/2008 tanggal 30 Desember 2008 (terlampir) telah meminta untuk dilakukan pemindahbukuan PNBP sebesar Rp941.384.084.298,23 dari Rekening Penerimaan Panas Bumi No. 508.000084 ke Rekening Bendahara Umum Negara No. 502.000000 Kode Akun 421611 (Pendapatan Pertambangan Panas Bumi).

Realisasi PNBP Pertambangan Panas Bumi TA 2008 sebesar Rp941.384.084.298,23 terdiri dari:

1. PNBP Pertambangan Panas Bumi tahun 2006 Rp171.702.948.592,83
2. PNBP Pertambangan Panas Bumi tahun 2007 Rp108.642.972.580,20
3. PNBP Pertambangan Panas Bumi tahun 2008 Rp661.038.164.125,20

Kronologis Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

Landasan hukum yang mendasari kegiatan pengusahaan panas bumi, terbagi ke dalam 2 periode :

a. Kontrak yang ditandatangani sebelum diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi (*existing contract*) mengacu pada :

- Keputusan Presiden (Keppres) No. 49 tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik (terlampir).
Dalam Keppres ini diatur bahwa para pengusaha panas bumi wajib menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha (NOI). Penyetoran bagian pemerintah tersebut telah termasuk semua kewajiban pembayaran pajak-pajak (PPh, PPN, PBB, Bea Masuk, Bea Meterai dan pungutan-pungutan lainnya).
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi Listrik sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 209/KMK.04/1998. KMK ini merupakan pelaksanaan dari Keppres No. 49 tahun 1991.

Dalam KMK ini diatur bahwa penyetoran bagian pemerintah sebesar 34% diberlakukan sebagai penyetoran Pajak Penghasilan. Adapun pajak-pajak lainnya yaitu PBN, PBB dan Pungutan-pungutan lainnya ditanggung/dikembalikan oleh Pemerintah.

- b. Kontrak kegiatan panas bumi yang ditandatangani setelah diberlakukannya UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, landasan hukumnya adalah :

- UU 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

Dalam UU ini mengatur antara lain bagi pemegang Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa :

- Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
- Pungutan Negara Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bonus.

Sesuai dengan Pasal 41 "Ketentuan Peralihan" UU No. 27 tahun 2003 bahwa semua kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak.

- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur antara lain bahwa hasil dari pertambangan panas bumi yang dapat dibagikan kepada daerah adalah yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi pajak-pajak dan pungutan-pungutan, dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah.

Sampai dengan saat ini, setoran bagian Pemerintah yang berada di Rekening Penerimaan Panas Bumi No. 508.000084 pada Bank Indonesia seluruhnya berasal dari hasil pengusahaan panas bumi yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 27 tahun 2003. Setoran bagian Pemerintah tersebut berasal dari 6 (enam) pengusaha panas bumi yaitu PT Pertamina Geothermal Energy, Chevron Geothermal Salak, Ltd, Dayabumi Salak Pratama, Ltd, Chevron Geothermal Indonesia, Ltd, Chevron Darajat, Ltd dan PT Darajat Geothermal Indonesia, Ltd. Tahun 2003 (existing contract).

Mengingat dalam KMK No.766/KMK.04/1992 mengatur bahwa setoran 34% NOI dari pengusaha panas bumi diberlakukan sebagai PPh, hal ini menimbulkan permasalahan mengenai setoran bagian pemerintah yang akan diperhitungkan sebagai PNBP.

Disamping itu, adanya desakan Pemda yang semakin kuat untuk memperoleh Dana Bagi Hasil dari SDA panas bumi serta kecilnya persentase setoran bagian Pemerintah (34%) dibandingkan dengan tarif pajak pada saat penandatangan kontrak (48%), turut mempersulit dalam perhitungan PNBP. Apabila setoran bagian Pemerintah tersebut dikurangi dengan unsur-unsur perpajakan, hampir dapat dipastikan tidak ada setoran bagian Pemerintah yang akan diperhitungkan sebagai PNBP.

Dalam rangka memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah dan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor, pada tanggal 4 Nopember 2008 Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.165/PMK.03/2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik. PMK tersebut mengatur antara lain mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah serta penghitungan PNBP

dari kegiatan pengusahaan panas bumi untuk tahun 2006, 2007 dan 2008. Dalam mekanisme PPh DTP ini Pemerintah mengalokasikan anggaran PPh atas komoditi panas bumi setiap tahun dalam APBN.

Dengan mengacu pada PMK tersebut serta berdasarkan data yang ada (setoran bagian Pemerintah, pembayaran PBB pertambangan panas bumi, *reimbursement* PPN kepada pengusaha panas bumi) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak telah melakukan **verifikasi** penghitungan PNBP tahun 2006 s.d 2008 yang besarnya adalah sebesar Rp941.384.084.298,23.

Berdasarkan surat Dirjen Anggaran kepada Dirjen Perbendaharaan No. S-4160/AG/2008 tanggal 30 Desember 2008 (terlampir) telah meminta untuk dilakukan pemindahbukuan PNBP sebesar Rp941.384.084.298,23 dari Rekening Penerimaan Panas Bumi No. 508.000084 ke Rekening Bendahara Umum Negara No. 502.000000 Kode Akun 421611 (Pendapatan Pertambangan Panas Bumi).

PNBP Pertambangan Panas Bumi tahun 2006, 2007 dan 2008 dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik yaitu :

- a. Untuk PNBP tahun 2006 dan 2007 dihitung dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran pajak-pajak dan pungutan-pungutan lain termasuk Pajak Penghasilan.
- b. Untuk PNBP tahun 2008 dihitung dari setoran bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran pajak-pajak dan pungutan-pungutan lain.

Sedangkan untuk penyelesaian kewajiban pajak penghasilan menggunakan mekanisme pajak penghasilan ditanggung pemerintah.

B.1.2.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2008 adalah sebesar Rp29.088.370.115.749,00 atau 93,10 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 sebesar Rp31.244.300.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2008 sebesar Rp29.088.370.115.749,00 terdiri dari Pendapatan Laba BUMN Perbankan sebesar Rp.4.505.885.921.805,00 dan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan sebesar Rp 24.582.484.193.944,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2007, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp5.865.867.583.870,00 atau 25,26 Persen dari realisasi TA 2007. Peningkatan ini antara lain disebabkan meningkatnya setoran dividen dari PT Pertamina (Persero), PT Telkom Tbk dan Bank Mandiri, disamping beberapa BUMN yang lain.

*Realisasi Bagian
Pemerintah atas
Laba BUMN
Rp29.088.370.115.7
49,00*

Besarnya realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas laba BUMN TA 2008 dapat dilihat pada tabel 17 berikut.

Tabel 17
Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2008
(dalam rupiah)

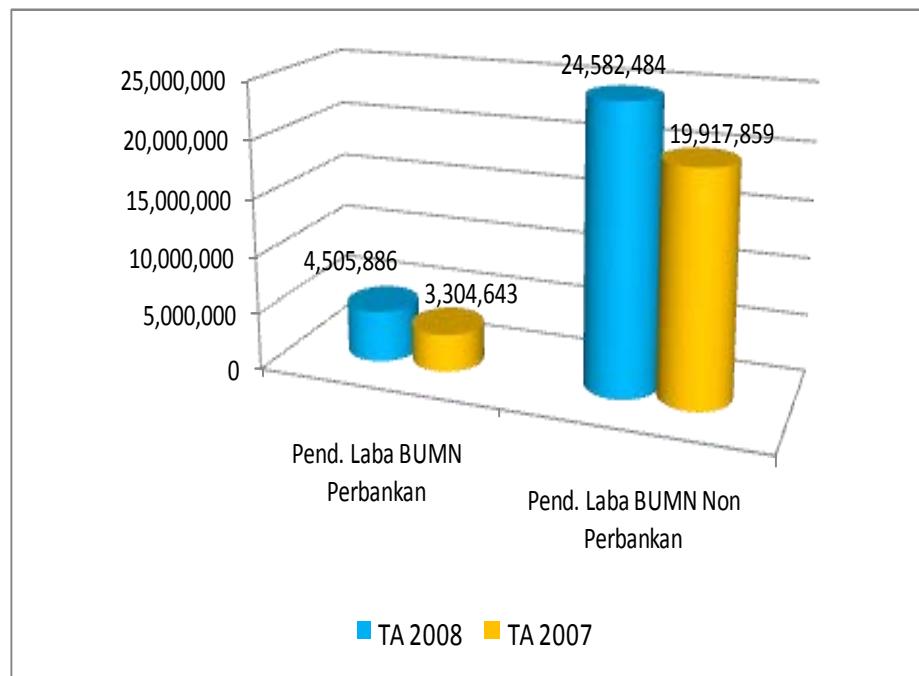
Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	3.870.403.000.000	4.505.885.921.805	116,42%
Pend. Laba BUMN Non Perbankan	27.373.897.000.000	24.582.484.193.944	89,80%
Total	31.244.300.000.000	29.088.370.115.749	93,10%

Perbandingan realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas laba BUMN TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 18 dan grafik 11 berikut.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pemerintah atas Laba BUMN
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	4.505.885.921.805	3.304.642.991.498	1.201.242.930.307	36,35%
Pend. Laba BUMN Non Perbankan	24.582.484.193.944	19.917.859.540.381	4.664.624.653.563	23,42%
Total	29.088.370.115.749	23.222.502.531.879	5.865.867.583.870	25,26%

Grafik 11
Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)



Berikut ini adalah daftar 10 BUMN penghasil deviden terbesar TA 2008:

Tabel 19
Daftar 10 BUMN Penghasil Deviden Terbesar
Tahun Anggaran 2008

No.	Nama BUMN	Jumlah	% dari Total Pend. Laba BUMN *)
1	PT. Pertamina	14,105,932,879,749	48.49%
2	PT. Telkom	4,206,500,016,562	14.46%
3	PT. Bank Mandiri	2,619,540,000,000	9.01%
4	PT. Bank Rakyat Indonesia	1,374,380,000,000	4.72%
5	PT. Aneka Tambang	1,334,439,715,180	4.59%
6	PT. Timah	579,992,400,000	1.99%
7	PT. Freeport Indonesia	477,697,869,000	1.64%
8	PT. Semen Gresik	452,782,261,960	1.56%
9	PT. Perusahaan Gas Negara	429,126,020,233	1.48%
10	PT. Pelabuhan Indonesia II	383,440,000,000	1.32%
Total 10 BUMN		25,963,831,162,684	89.26%

*) Total Pendapatan Laba BUMN TA 2008 Rp29.088.370.115.749,00

Bagian Laba BUMN yang berkontribusi cukup signifikan terhadap kenaikan PNBP dipengaruhi oleh beberapa hal: (i) jumlah kepemilikan saham pada BUMN; (ii) laba bersih setelah pajak (*earning after tax*); (iii) besarnya *pay out ratio*; (iv) rencana strategis BUMN dalam melakukan ekspansi usaha, privatisasi, dan merger serta (v) kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi kinerja masing-masing BUMN. Penyumbang terbesar bagian laba BUMN adalah sektor pertambangan.

B.1.2.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya TA 2008 adalah sebesar Rp17.723.475.356.340,00 atau 85,24 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2008 yaitu sebesar Rp20.793.555.967.945,00 Apabila dibandingkan dengan TA 2007, PNBP Lainnya TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp8.411.751.883.988,00 atau 90,34 persen dari realisasi TA 2007. Besarnya realisasi PNBP Lainnya dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

Tabel 20
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pend. Penjualan dan Sewa	20.596.361.845.197	16.972.842.205.400	82,41%
Pendapatan Jasa	137.330.679.111	328.289.106.112	239,05%
Pendapatan Bunga	0	309.195.155.616	0,00%
Pendapatan Pendidikan	18.000.000.000	9.959.935.000	55,33%
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	155.000.000	0,00%
Pendapatan Iuran dan Denda	40.004.093.000	86.260.653.579	215,63%
Pendapatan Lain-lain	1.859.350.637	16.773.300.633	902,11%
Total	20.793.555.967.945	17.723.475.356.340	85,24%

*Realisasi PNBP
lainnya
Rp17.723.475.356.340,00*

Perbandingan antara realisasi PNBP Lainnya TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 21 berikut.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Penjualan dan Sewa	16.972.842.205.400	373.474.771.179	16.599.367.434.221	4444,58%
Pendapatan Jasa	328.289.106.112		328.289.106.112	0,00%
Pendapatan Bunga	309.195.155.616			0,00%
Pendapatan Pendidikan	9.959.935.000	12.904.976.471		0,00%
Pend. Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	155.000.000			0,00%
Pendapatan Iuran dan Denda	86.260.653.579		86.260.653.579	0,00%
Pendapatan Lain-lain	16.773.300.633	8.925.343.724.702	(8.908.570.424.069)	-99,81%
Total Pendapatan	17.723.475.356.340	9.311.723.472.352	8.105.346.769.843	87,04%

B.1.2.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp40.998.817.782,00 atau 33,44 persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008 yaitu sebesar Rp122.619.663.000,00. Rincian Realisasi pendapatan BLU yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 22 berikut.

Tabel 22
Realisasi Pendapatan BLU Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	122.619.663.000	39.290.052.705	32,04%
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	0	53.250.000	0,00%
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	1.652.710.000	0,00%
Pendapatan BLU Lainnya	0	2.805.077	0,00%
Total	122.619.663.000	40.998.817.782	33,44%

*Realisasi
Pendapatan BLU
Rp40.998.817.
782,00*

B.1.3. Penerimaan Hibah

*Realisasi
Penerimaan Hibah
Rp0,00*

Tidak ada penerimaan hibah di Kementerian Keuangan pada TA 2008.

B.2. BELANJA

*Realisasi belanja
Rp12.051.098.275.
474,00*

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan pada TA 2008 adalah sebesar Rp12.051.098.275.474,00 atau 79,69 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp15.121.923.948.104,00. Realisasi belanja TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp5.051.899.436.586,00 atau 72,18 persen dari realisasi belanja TA 2007 sebesar Rp6.999.198.838.888,00.

Perbandingan realisasi belanja dengan DIPA TA 2008 menurut sumber dana dapat dilihat pada tabel 23 berikut.

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja dengan Pagu DIPA Menurut Sumber Dana
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

*Perbandingan
Realisasi Belanja
dengan Pagu DIPA*

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	14.326.517.664.104	11.819.190.843.252	82,50%
Pinjaman Luar Negeri	447.306.200.000	203.148.034.335	45,42%
Hibah	348.100.084.000	28.759.397.887	8,26%
Total	15.121.923.948.104	12.051.098.275.474	79,69%

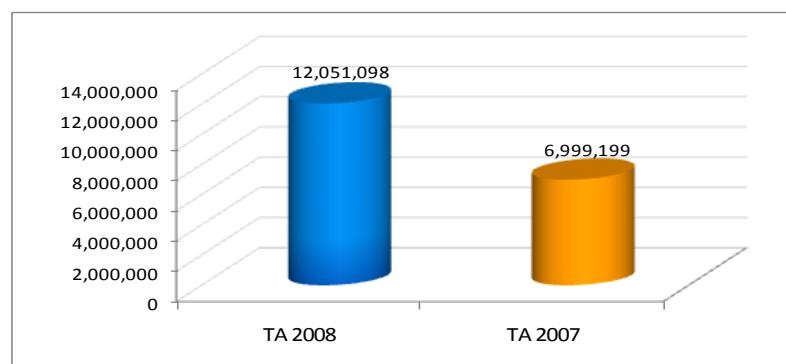
Perbandingan antara realisasi belanja TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel 24 dan grafik 12 berikut.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

*Perbandingan
Realisasi Belanja TA
2008 dan 2007*

Uraian	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Rupiah Murni	11.819.190.843.252	6.971.088.629.684	4.848.102.213.568	69,55%
Pinjaman Luar Negeri	203.148.034.335	16.623.347.933	186.524.686.402	1122,06%
Hibah	28.759.397.887	11.486.861.271	17.272.536.616	150,37%
Total	12.051.098.275.474	6.999.198.838.888	5.051.899.436.586	72,18%

Grafik 12
Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Belanja Kementerian Keuangan meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran bunga utang.

Belanja Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I, fungsi, jenis belanja dan jenis Satuan kerja.

B.2.1.1. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2008 sebesar Rp12.051.098.275.474,00. Jumlah tersebut dapat dirinci menurut unit eselon I sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.538.155.137.425,00 atau 37,66 persen dari total belanja. Sementara itu, realisasi berdasarkan daya serap TA 2008 pada Kementerian Keuangan terbesar adalah Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp4.113.239.927.685,00 atau 91,31 persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja menurut unit eselon I dapat dilihat pada tabel 25 berikut.

Tabel 25
Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

No.	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	SETJEN	5.428.404.339.000	4.538.155.137.425	83,60%
2	ITJEN	70.158.366.000	55.616.657.522	79,27%
3	DJA	72.664.713.000	53.266.844.930	73,30%
4	DJP	4.504.740.255.000	4.113.239.927.685	91,31%
5	DJBC	2.245.700.604.000	1.499.017.690.051	66,75%
4	DJPK	237.447.887.000	66.229.308.680	27,89%
5	DJPU	74.841.751.000	55.687.797.388	74,41%
8	DJPB	1.211.121.797.000	878.169.099.666	72,51%
9	DJKN	563.997.570.000	423.826.964.574	75,15%
10	BAPEPAM-LK	111.975.647.000	94.401.906.684	84,31%
11	BPPK	232.569.313.104	199.365.865.400	85,72%
12	BKF	368.301.706.000	74.121.075.469	20,13%
JUMLAH		15.121.923.948.104	12.051.098.275.474	79,69%

B.2.1.2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Fungsi

Belanja Kementerian Keuangan juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Realisasi Belanja Kementerian Keuangan menurut Fungsi pada TA 2008 adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 26 berikut.

Tabel 26
Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Pagu	Realisasi	%
01	Pelayanan Umum	15.109.266.871.000	12.039.438.274.209	79,68%
10	Pendidikan	12.657.077.104	11.660.001.265	92,12%
	Total	15.121.923.948.104	12.051.098.275.474	79,69%

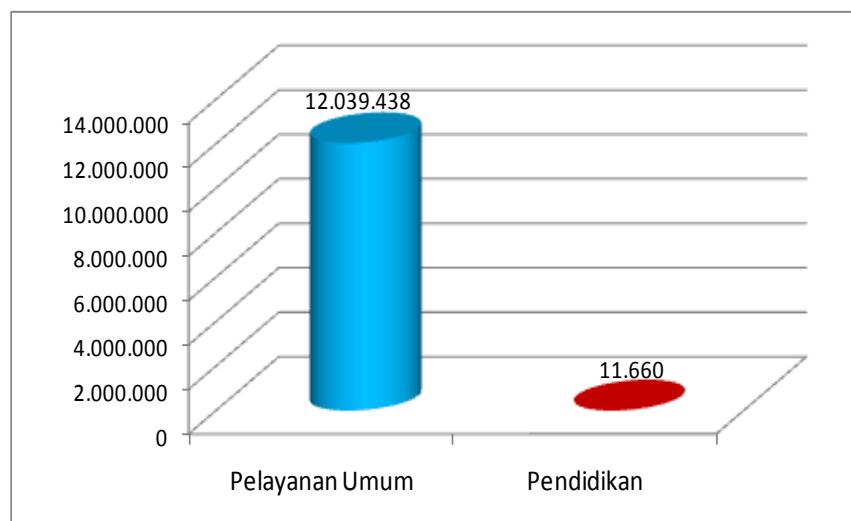
Perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 27 berikut.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
01	Pelayanan Umum	12.039.438.274.209	6.988.396.018.331	5.051.042.255.878	72,28%
10	Pendidikan	11.660.001.265	10.802.820.557	857.180.708	7,93%
	Total	12.051.098.275.474	6.999.198.838.888	5.051.899.436.586	72,18%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2008 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum (01) yaitu sebesar Rp12.039.438.274.209,00 atau 99,90 persen dari total belanja. Sementara itu, komposisi realisasi Belanja Kementerian Keuangan menurut fungsi dapat dilihat pada grafik 13 berikut.

Grafik 13
Realisasi Belanja Menurut Fungsi
Tahun Anggaran 2008
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.3. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja

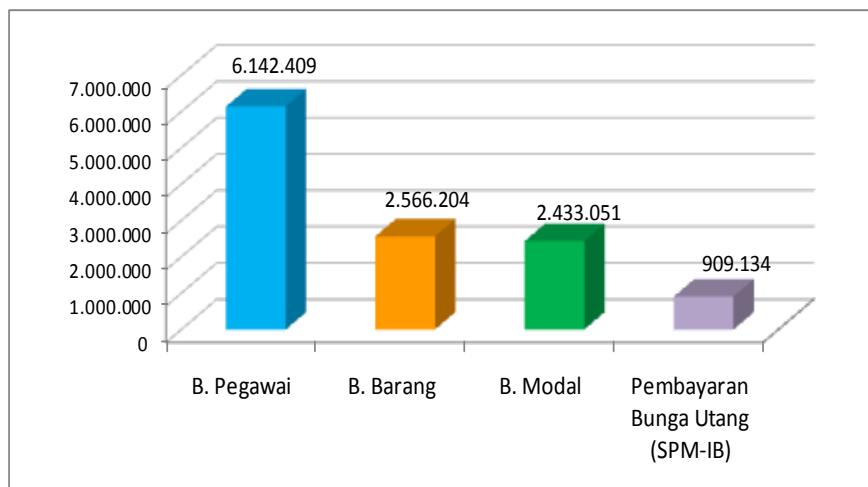
Belanja Kementerian Keuangan menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; dan Pembayaran Bunga Utang. Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel 28 berikut.

Tabel 28
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	7.332.036.731.373	6.142.408.788.889	83,77%
2.	Belanja Barang	4.310.577.314.231	2.566.504.146.275	59,54%
3.	Belanja Modal	3.479.309.902.500	2.433.051.247.366	69,93%
4.	Pembayaran Bunga Utang (SPM-IB)	0	909.134.092.944	0,00%
	Jumlah	15.121.923.948.104	12.051.098.275.474	79,69%

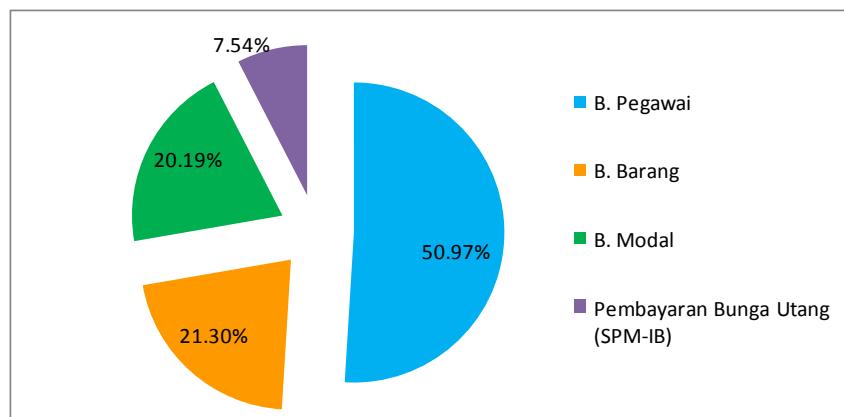
Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk tahun anggaran 2008 sebagaimana tampak pada tabel 28 dan dapat digambarkan pada grafik 14 berikut.

Grafik 14
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2008
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2008 juga dapat digambarkan dalam grafik 15 berikut.

Grafik 15
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2008



*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp6.142.408.788.
889,00*

B.2.1.3.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2008 adalah sebesar Rp6.142.408.788.889,00 yang berarti 83,77 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008 sebesar Rp7.332.036.731.373,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2007, realisasi Belanja Pegawai TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp4.363.927.699.495,00 atau 245,37 persen dari TA 2007.

Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pemindahan/pembebanan anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan Negara (TKPKN) dari BA 069 menjadi BA 015 Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Rincian Belanja Pegawai TA 2008 dapat dilihat pada tabel 29 berikut.

Tabel 29
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Belanja Pegawai	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.361.265.662.373	1.954.966.767.373	82,79%
Belanja Honorarium	178.950.850.500	134.544.129.587	75,18%
Belanja Lembur	87.827.755.500	57.853.313.075	65,87%
Belanja Vakasi	708.377.000	9520000	1,34%
Belanja Tunj. Khusus & B. Pegawai Transito	4.703.284.086.000	3.995.035.058.854	84,94%
Total	7.332.036.731.373	6.142.408.788.889	83,77%

Realisasi belanja pegawai BLU nihil karena gaji masih dibayar oleh satuan kerja asal pegawai BLU.

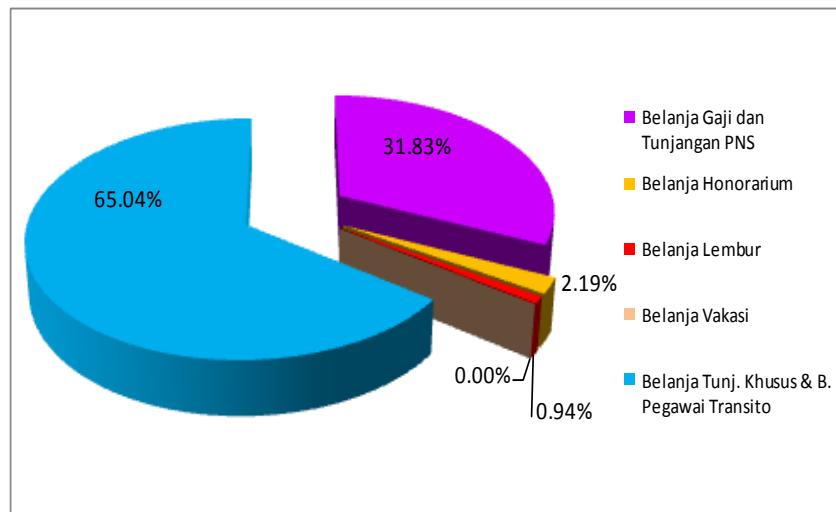
Perbandingan antara realisasi belanja pegawai TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel 30 berikut.

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Belanja Barang	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.954.966.767.373	1.599.643.473.596	355.323.293.777	22,21%
Belanja Honorarium	134.544.129.587	126.111.211.196	8.432.918.391	6,69%
Belanja Lembur	57.853.313.075	52.694.705.852	5.158.607.223	9,79%
Belanja Vakasi	9.520.000	31.698.750	(22.178.750)	(69,97%)
Belanja Tunj. Khusus & B. Pegawai Transito	3.995.035.058.854	0	3.995.035.058.854	0,00%
Total	6.142.408.788.889	1.778.481.089.394	4.363.927.699.495	245,37%

Komposisi Belanja Pegawai TA 2008 dapat digambarkan dalam Grafik 16 berikut.

Grafik 16
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2008



Berikut adalah realisasi Belanja Pegawai per Unit Eselon I:

Tabel 31
Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

No.	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	SETJEN	4.809.544.775.000	4.069.439.387.569	84,61%
2	ITJEN	19.081.581.000	17.542.900.642	91,94%
3	DJA	37.308.912.000	30.606.758.581	82,04%
4	DJP	1.208.849.076.373	1.004.896.490.194	83,13%
5	DJBC	487.896.981.000	351.784.565.651	72,10%
4	DJKP	25.469.184.000	20.498.402.340	80,48%
5	DJPU	19.819.667.000	16.734.239.445	84,43%
8	DJPB	462.751.201.000	406.278.789.964	87,80%
9	DJKN	141.289.890.000	125.440.587.878	88,78%
10	BAPEPAM-LK	37.587.531.000	34.962.274.147	93,02%
11	BPPK	37.621.244.000	35.597.859.204	94,62%
12	BKF	44.816.689.000	28.626.533.274	63,87%
JUMLAH		7.332.036.731.373	6.142.408.788.889	83,77%

B.2.1.3.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2008 adalah sebesar Rp2.566.504.146.275,00 yang berarti 59,54 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008 sebesar Rp4.310.577.314.231,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2007, realisasi Belanja Barang TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp567.920.035.375,00 atau 28,42 persen dari TA 2007. Rincian Belanja Barang TA 2008 adalah sebagai berikut:

*Realisasi Belanja
Barang
Rp2.566.504.146.275,00*

Tabel 32
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Belanja Barang	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	1.380.995.034.190	929.579.588.276	67,31%
Belanja Barang Non Operasional	681.475.897.998	433.648.098.866	63,63%
Belanja Jasa	832.908.765.857	318.212.332.380	38,20%
Belanja Pemeliharaan	615.609.940.610	398.823.904.133	64,79%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	752.809.150.472	466.940.011.936	62,03%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	33.861.131.000	15.805.879.816	46,68%
Belanja Barang BLU	12.917.394.104	3.494.330.868	27,05%
Total	4.310.577.314.231	2.566.504.146.275	59,54%

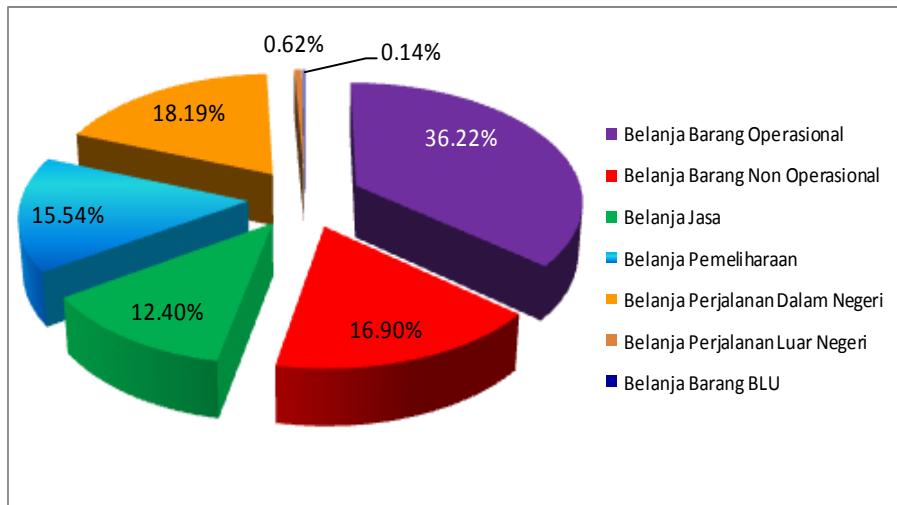
Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam jutaan rupiah)

Belanja Barang	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Barang Operasional	929.579.588.276	979.701.670.406	(50.122.082.130)	(5,12%)
Belanja Barang Non Operasional	433.648.098.866	9.636.498.412	424.011.600.454	4400,06%
Belanja Jasa	318.212.332.380	227.779.637.264	90.432.695.116	39,70%
Belanja Pemeliharaan	398.823.904.133	445.351.322.497	(46.527.418.364)	(10,45%)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	466.940.011.936	336.114.982.321	130.825.029.615	38,92%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	15.805.879.816	0	15.805.879.816	0,00%
Belanja Barang BLU	3.494.330.868	0	3.494.330.868	0,00%
Total	2.566.504.146.275	1.998.584.110.900	567.920.035.375	28,42%

Komposisi Belanja Barang TA 2008 dapat digambarkan dalam grafik 17.

Grafik 17
Komposisi Realisasi Belanja Barang



Berikut adalah realisasi Belanja Barang per Unit Eselon I:

Tabel 34
Realisasi Belanja Barang Per Eselon I
Tahun Anggaran 2008
(dalam jutaan rupiah)

No.	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	SETJEN	274.412.750.000	162.774.852.934	59,32%
2	ITJEN	47.432.283.000	35.281.955.167	74,38%
3	DJA	30.808.731.000	18.297.842.961	59,39%
4	DJP	1.536.482.984.127	947.301.977.025	61,65%
5	DJBC	904.922.063.000	576.791.162.848	63,74%
4	DJKP	68.253.308.000	40.416.769.354	59,22%
5	DJPU	49.076.689.000	34.190.221.737	69,67%
8	DJPB	539.029.727.000	327.493.638.844	60,76%
9	DJKN	373.339.822.000	255.387.302.932	68,41%
10	BAPEPAM-LK	43.824.969.000	29.605.000.159	67,55%
11	BPPK	130.663.481.104	102.731.021.079	78,62%
12	BKF	312.330.507.000	36.232.401.235	11,60%
JUMLAH		4.310.577.314.231	2.566.504.146.275	59,54%

*Realisasi Belanja
Modal
Rp2.433.051.247.
366,00*

B.2.1.3.1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2008 adalah sebesar Rp2.433.051.247.366,00 yang berarti 69,93 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2008 sebesar Rp3.479.309.902.500,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2007, realisasi Belanja Modal TA 2008 mengalami penurunan sebesar Rp180.433.759.549,00 atau (6,90) persen dari TA 2007. Rincian Belanja Modal TA 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

Belanja Modal	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	41,542,707,000	32,323,690,164	77.81%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,916,471,020,000	1,223,262,014,307	63.83%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,259,153,845,500	998,961,126,277	79.34%
Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi	39,858,304,000	29,644,697,525	74.38%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	74,877,678,000	62,078,270,368	82.91%
Belanja Modal Fisik Lainnya	144,517,688,000	84,230,594,005	58.28%
Belanja Modal BLU	2,888,660,000	2,550,854,720	88.31%
Total	3,479,309,902,500	2,433,051,247,366	69.93%

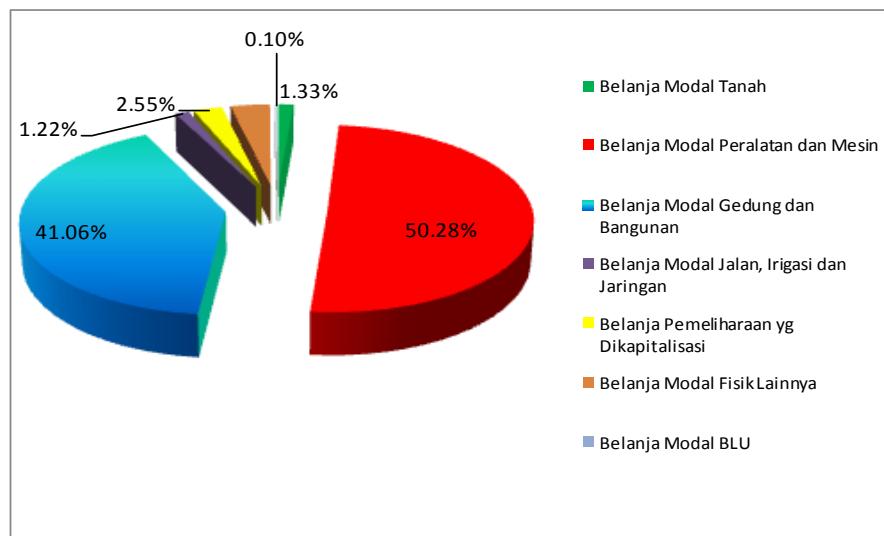
Perbandingan antara realisasi Belanja Modal TA 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 36 berikut.

Tabel 36
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Belanja Modal	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	32.323.690.164	66.691.744.219	(34.368.054.055)	(51,53%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.223.262.014.307	479.253.510.233	744.008.504.074	155,24%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	998.961.126.277	988.754.527.310	10.206.598.967	1,03%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.644.697.525	1.048.488.996.056	(1.018.844.298.531)	(97,17%)
Belanja Pemeliharaan yg Dikapitalisasi	62.078.270.368	0	62.078.270.368	0,00%
Belanja Modal Fisik Lainnya	84.230.594.005	30.296.229.097	53.934.364.908	178,02%
Belanja Modal BLU	2.550.854.720	0	2.550.854.720	0,00%
Total	2.433.051.247.366	2.613.485.006.915	(180.433.759.549)	(6,90%)

Komposisi Belanja Modal TA 2008 dapat digambarkan dalam Grafik 18.

Grafik 18
Komposisi Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2008



Berikut adalah realisasi Belanja Modal per Unit Eselon I:

Tabel 37
Realisasi Belanja Modal Per Eselon I
Tahun Anggaran 2008
(dalam rupiah)

No.	Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	SETJEN	344.446.814.000	305.940.896.922	88,82%
2	ITJEN	3.644.502.000	2.791.801.713	76,60%
3	DJA	4.547.070.000	4.362.243.388	95,94%
4	DJP	1.759.408.194.500	1.254.752.296.897	71,32%
5	DJBC	852.881.560.000	567.597.032.177	66,55%
4	DJPK	143.725.395.000	5.314.136.986	3,70%
5	DJPU	5.945.395.000	4.763.336.206	80,12%
8	DJPB	209.340.869.000	144.396.670.858	68,98%
9	DJKN	49.367.858.000	42.999.073.764	87,10%
10	BAPEPAM-LK	30.563.147.000	29.834.632.378	97,62%
11	BPPK	64.284.588.000	61.036.985.117	94,95%
12	BKF	11.154.510.000	9.262.140.960	83,03%
JUMLAH		3.479.309.902.500	2.433.051.247.366	69,93%

B.2.1.3.4. Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Pembayaran Bunga Utang TA 2008 adalah sebesar Rp909.134.092.944,00 yang merupakan imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang TA 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp300.485.461.265,00 atau 49,37 persen apabila dibandingkan pengeluaran yang sama untuk TA 2007. Komposisi realisasi Pembayaran Bunga Utang tersebut disajikan pada tabel 38 berikut.

*Realisasi
pembayaran bunga
utang
Rp909.134.092
.944,00*

Tabel 38
Realisasi Pembayaran Bunga Utang
Tahun Anggaran 2008 dan 2007
(dalam rupiah)

Pembayaran Bunga Utang	TA 2008	TA 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	906.289.163.569	608.336.602.647	297.952.560.922	48,98%
Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai	2.844.929.375	312.029.032	2.532.900.343	811,75%
Total	909.134.092.944	608.648.631.679	300.485.461.265	49,37%

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

- Untuk Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Direktorat PNBP pada Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan PNBP lainnya, mulai TA 2009 akan dilaporkan melalui Bagian Anggaran 999.99 untuk satker BUN, diluar Laporan Keuangan BA 015 Kementerian Keuangan.
- Dalam rangka transparansi pengelolaan penerimaan SDA yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411 dan rekening 508.000084), **lampiran 10** menyajikan mutasi rekening dimaksud. Saldo per 31 Desember 2008 untuk rekening penerimaan migas adalah USD1,425,926,061.61 ekuivalen Rp15.613.890.374.629,50 (kurs tengah BI per 31 Desember 2008, 1USD=Rp10.950). Sedangkan saldo per 31 Desember 2008 untuk rekening penerimaan panas bumi adalah Rp86.635.248.233,00.

Di dalam saldo rekening 600.000.411 per 31 Desember 2008 tersebut, terdapat potensi pendapatan negara yang dapat diidentifikasi sebagai calon pendapatan di tahun 2009, yakni sebesar USD387.000.948,77 (ekuivalen Rp4.237.660.389.031).

Sementara itu, saldo rekening 508.000084 per 31 Desember 2008 sebesar Rp86.635.248.233,00 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban terkait dengan kegiatan usaha panas bumi, yang terdiri dari:

- Cadangan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) PPN Panas Bumi sebesar Rp22.732.765.471,00.
- Cadangan Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Tahun 2008 untuk 5 Wilayah Kerja Panas Bumi yang baru sebesar Rp62.929.720.000,00.
- Cadangan Pembayaran PBB Pertambangan panas bumi Triwulan IV Tahun 2008 untuk 2 (dua) kabupaten sebesar Rp972.762.762,00.

Disamping itu, **lampiran 11** juga menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran

pada rekening 508.000071 (Penerimaan Pertambangan dan Perikanan). Laporan tersebut menyajikan mutasi penerimaan dan pengeluaran SDA non migas yang antara lain berupa penerimaan royalty, landrent, *annual fee* PT Inalum dan pengeluaran kas yang terkait dengan *annual fee* PT Inalum.

- Pada bulan Januari 2009, terdapat realisasi penerimaan negara sebesar USD 127.572.319.57 (ekuivalen Rp1.448.583.688.717,35) yang berasal dari sebagian saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2008. Realisasi penerimaan tersebut merupakan Pendapatan PPh Migas sebesar Rp 1.178.230.170.143,70 dan Pendapatan SDA Migas Rp270.353.518.573,65.
- Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak telah dilakukan rekonsiliasi data penerimaan pajak. Rekonsiliasi dilakukan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perpendaharaan, dengan cara membandingkan transaksi penerimaan pajak dalam database MPN dengan transaksi penerimaan pajak dalam database Laporan Arus Kas (LAK).

Hasil perbandingan data per transaksi penerimaan pajak antara database MPN dengan database LAK secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Transaksi	Cocok	Belum Cocok	Total
MPN dan ePayPoint (Termasuk PBB dan BPHTB)	30.072.322	477.497.650.351.375	1.748.389.002.810	479.246.039.354.185
BUN (Termasuk PBB yang tidak Dibagikan)	327	124.122.746.558.476	0	124.122.746.558.476
Jumlah	30.072.649	601.620.396.909.851	1.748.389.002.810	603.368.785.912.661
	Persentase	99,71%	0,29%	100,00%

Dalam penerimaan pajak bruto sebesar Rp603.368.785.914.636,00 sebagaimana tersebut di atas, terdapat transaksi penerimaan pajak yang pajaknya ditanggung oleh Pemerintah sebesar Rp22.043.131.760.483,30 dengan rincian sebagai berikut:

Pajak DTP	MAP (Jenis Pajak)			Total
	411126	411127	411211	
BBM	0	0	14.765.000.000.000	14.765.000.000.000
Minyak Goreng	0	0	3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
Obligasi	0	800.000.000.000	0	800.000.000.000
Panas Bumi	500.000.000.000	0	0	500.000.000.000
PDRI	0	0	49.630.640.803	49.630.640.803
Subsidi Pupuk	0	0	1.028.501.119.680	1.028.501.119.680
Tepung Terigu	0	0	1.900.000.000.000	1.900.000.000.000
Total	500.000.000.000	800.000.000.000	20.743.131.760.483	22.043.131.760.483

- Pada TA 2008 terdapat kebijakan nasional mengenai penghematan anggaran kementerian negara/lembaga sebesar 15 persen sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-01/MK.02/2008 tanggal 2 Januari 2008 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-42/MK.02/2008. Sebagai akibat penghematan tersebut pagu anggaran Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari pagu awal.

- Pada TA 2008 BKF menerima hibah ADB sebesar Rp6.029.660.000,00. Metode pencairan anggaran kegiatan tersebut menggunakan metode Pembayaran Langsung, yaitu pihak donator langsung mendanai kegiatan penerima hibah tanpa mekanisme pembayaran melalui KPPN.

Selama TA 2008 pihak donor telah membiayai kegiatan tersebut sebesar Rp1,2 miliar yang ditransfer melalui rekening Bendahara Pengeluaran BKF. Pengeluaran belanja yang bersumber dari hibah ini belum dicatat sebagai realisasi belanja TA 2008 karena perlu dokumen pengesahan dari KPPN terkait. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2006, BKF telah mengajukan permintaan penerbitan Surat Permintaan Pencatatan/Pembukuan (SP3) kepada KPPN Khusus Jakarta VI. Pada akhir TA 2008, terhadap permintaan ini tidak dapat diselesaikan dan diputuskan sebagai belanja TA 2009 dengan menyediakan alokasi anggaran di DIPA 2009 serta menerbitkan SP3 pada TA 2009.

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Neraca Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp127.911.078.098.936,00; Kewajiban sebesar Rp343.821.563.014,00; dan Ekuitas Dana sebesar Rp127.567.256.535.922,00

Komposisi Neraca per 31 Desember 2008 dapat disajikan dalam tabel 39 berikut.

Tabel 39
Komposisi Neraca

Uraian	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
Aset	127.911.078.098.936	93.834.185.052.482	34.076.893.046.454
Kewajiban	343.821.563.014	2.024.920.395.221	(1.681.098.681.207)
Ekuitas Dana	127.567.256.535.922	91.809.264.657.261	35.757.991.878.661

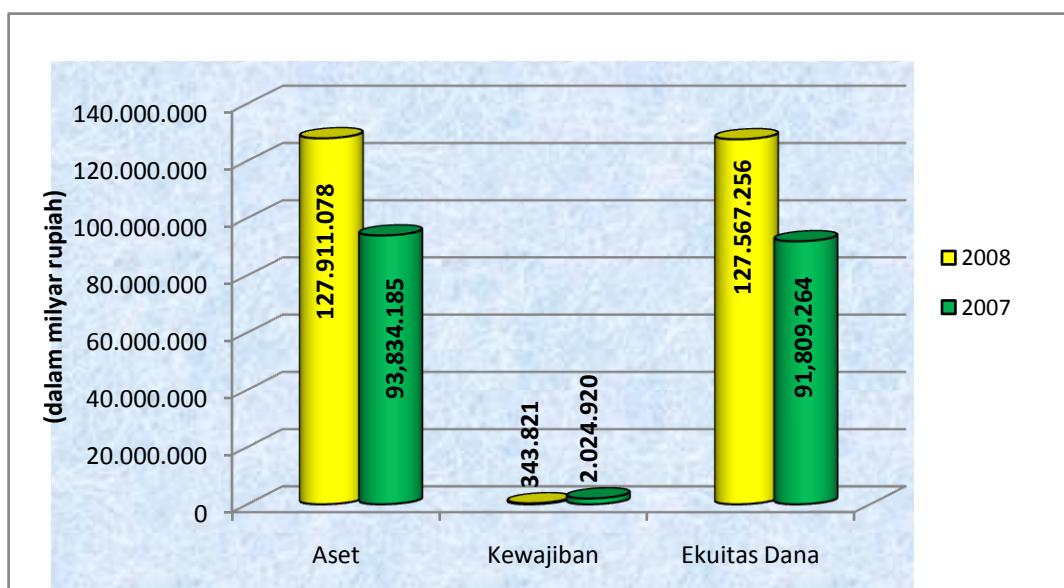
Jumlah Aset per 31 Desember 2008 sebesar Rp127.911.078.098.936,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp93.782.740.244.521,00; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp828.379.875.579,00; Aset Tetap sebesar Rp29.687.538.231.724,00; dan Aset Lainnya sebesar Rp3.612.419.747.112,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2008 sebesar Rp343.821.563.014,00 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp343.821.563.014,00.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp127.567.256.535.922,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp93.438.918.681.507,00 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp34.128.337.854.415,00.

Komposisi neraca dapat disajikan dalam grafik 19 berikut.

Grafik 19
Komposisi Neraca



C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Aset Lancar

C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp6.910.417.866,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp6.910.417.866,00 dan Rp11.778.438.432,00. Saldo tersebut merupakan saldo uang persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran ke kas negara sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 40 berikut.

Tabel 40
Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I

ESELON I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	39.790.339	919.030.781	(879.240.442)	(95,67%)
ITJEN	154.048.609	681.910.553	(527.861.944)	(77,41%)
DJA	0	2.303.000	(2.303.000)	(100,00%)
DJP	944.963.095	1.612.873.685	(667.910.590)	(41,41%)
DJBC	2.220.664.300	4.284.653.700	(2.063.989.400)	(48,17%)
DJKP	1.077.846.209	172.650.042	905.196.167	524,30%
DJPU	0	894.358.335	(894.358.335)	(100,00%)
DJPB	482.719.917	1.460.366.207	(977.646.290)	(66,95%)
DJKN	1.981.854.596	720.729.142	1.261.125.454	174,98%
BAPEPAMLK	0	7.073.440	(7.073.440)	(100,00%)
BPPK	6.571.762	1.022.224.547	(1.015.652.785)	(99,36%)
BKF	1.959.039	265.000	1.694.039	639,26%
	6.910.417.866	11.778.438.432	(4.868.020.566)	(41,33%)

Saldo bank sebesar Rp6.910.417.866,00 merupakan saldo rekening koran bank yang dibuka oleh bendahara pengeluaran untuk kepentingan operasional. Rincian daftar rekening bank dapat dilihat pada Lampiran 21 Daftar Rekening Dipertahankan.

Beberapa catatan penting atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran yang bersaldo minus di GKN Surabaya II per 31 Desember 2007 sebesar -1.144.375,00 telah dikoreksi menjadi Pendapatan Anggaran Lain-lain. Hal ini terjadi karena ada kelebihan setoran sisa UP yang seharusnya disetor ke Kas Negara.
2. Saldo kas sebesar Rp154.048.609,00 di Inspektorat Jenderal tersebut telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 8 Januari 2009 melalui Bank BNI Cabang Pecenongan - Jakarta.
3. Saldo rekening giro tidak sama dengan saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran karena dalam rekening koran terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara. Rincian dapat dilihat pada tabel 41 berikut.

Tabel 41
Saldo Rekening yang bukan berasal dari Uang Persediaan

Keterangan	Jumlah
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	
BAPEPAM-LK	Rp 2,177,773.00
BPPK	Rp 310,589,277.88
BKF	Rp 1,201,308.14
J U M L A H	Rp 313,968,359.02

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerima
RP2.551.056.124,
00*

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp2.551.056.124,00 dan sebesar Rp131.809.629.419,00. Jumlah tersebut mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 42 berikut:

Tabel 42
Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I

ESELON I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	246.771.871	4.000.000	242.771.871	6069,30%
ITJEN	0	0	0	0,00%
DJA	0	0	0	0,00%
DJP	1.822.735	0	1.822.735	0,00%
DJBC	37.717.021	7.600.116.162	(7.562.399.141)	(99,50%)
DJPK	5.515.783	892.429	4.623.354	518,06%
DJPU	0	3.231.965	(3.231.965)	(100,00%)
DJPB	33.956.493	34.572.751	(616.258)	(1,78%)
DJKN	2.220.673.613	124.163.870.896	(121.943.197.283)	(98,21%)
BAPEPAMILK	2.177.773	1.968.958	208.815	10,61%
BPPK	1.219.527	0	1.219.527	0,00%
BKF	1.201.308	976.258	225.050	23,05%
	2.551.056.124	131.809.629.419	(129.258.573.295)	(98,06%)

Tabel 43
Saldo Rekening yang bukan Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Jumlah
BPPK	Rp 1,737,297.00
J U M L A H	Rp 1,737,297.00

Jumlah sebesar Rp2.551.056.124,00 merupakan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2008 yang berada di rekening giro Bendahara Pengeluaran.

C.2.1.3 Kas pada BLU

Kas pada BLU
Rp221.279.325.2
36

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp221.279.325.236,00 dan sebesar Rp13.808.096.801,00.

Rincian Kas Badan Layanan Umum pada unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 44 berikut.

Tabel 44
Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	Setjen (PIP)	218.566.826.496	13.808.096.801	204.758.729.693
11	BPPK (STAN)	2.712.498.742	-	2.712.498.742
	Jumlah	221.279.325.236	13.808.096.801	207.471.228.435

Penjelasan Kas pada Badan Layanan Umum

- Nilai sebesar Rp218.566.826.894,00 di Setjen merupakan besaran kas di bank milik PIP (baik dalam bentuk giro maupun deposito dengan masa sampai dengan tiga bulan), Kas Di Bendahara Penerimaan selain kewajiban setor Kas Negara dan Kas Di Bendahara Pengeluaran.

Rincian saldo Kas pada BLU Sekretariat Jenderal sebagai berikut :

No	Nama Bank	Jumlah Rupiah
1.	Deposito Bank BNI (1 bulan)	Rp. 180.000.000.000
2.	Deposito Bank Mega Syariah (1 bulan)	Rp. 20.000.000.000
3.	Kas di Bendahara pengeluaran	Rp. 484.717.953
4.	Kas di Bendahara penerimaan	Rp. 2.126.589.588
5.	Kas BLU yang dibukukan pada RIDI	Rp. 15.955.518.944
6.	Pembulatan	Rp. (1)
	Jumlah	Rp. 218.566.826.494

- Saldo pada BLU STAN sebesar Rp2.712.498.742,00 sebagai berikut :

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Rupiah	Keterangan
0100	Prop. DKI (STAN)	Rp. 2.804.442	Kas di Tangan
0100	Prop. DKI (STAN)	Rp. 2.689.758.475.49	Kas di Bank
0100	Prop. DKI (STAN)	Rp. 14.272.325	Kas Operasional Aktuaria
0100	Prop. DKI (STAN)	Rp. (3.336.500)	Pajak yang belum Disetor
	Jumlah	Rp. 2.712.498.742.49	

C.2.1.4 Piutang Pajak

*Piutang Pajak
Rp55.545.222.477.951,00*
Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp55.545.222.477.951,00 dan sebesar Rp42.042.099.564.945,00.
Rincian Piutang Pajak pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 45 berikut.

Tabel 45
Piutang Pajak Per Unit Eselon I
(dalam rupiah)

ESELON I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/ Penurunan
DJA	53.788.164.621	187.733.156.816	(133.944.992.195)
DJP	45.173.077.395.397	31.906.597.010.360	13.266.480.385.037
DJBC	10.318.356.917.933	9.947.769.397.769	370.587.520.164
JUMLAH	55.545.222.477.951	42.042.099.564.945	13.503.122.913.006

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp55.545.222.477.951,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Piutang Pajak di DJA per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp53.788.164.621,00 dan Rp187.733.156.816,00 merupakan Piutang Pungutan Ekspor. Piutang ini terdiri dari piutang kepada PT Nalendra Bhakti Persada sebesar Rp2.259.736.430,00 dan PT Tanito Harum sebesar Rp40.775.949.620,00 dan PT Indominco Mandiri sebesar Rp10.752.478.570,00. Jumlah angka piutang tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP terhadap eksportir tersebut. Piutang Pungutan Ekspor ini merupakan piutang yang belum dilimpahkan oleh Ditjen Anggaran kepada Ditjen Kekayaan Negara.
2. Jumlah Piutang Pajak di DJP per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp45.173.077.395.397,00 dan Rp31.906.597.010.360,00 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 31 Desember 2008. Rincian piutang pajak berdasarkan satuan mata uang dapat dilihat di lampiran 12.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak (dalam rupiah) dapat dilihat pada tabel 46 berikut.

Tabel 46
Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2008

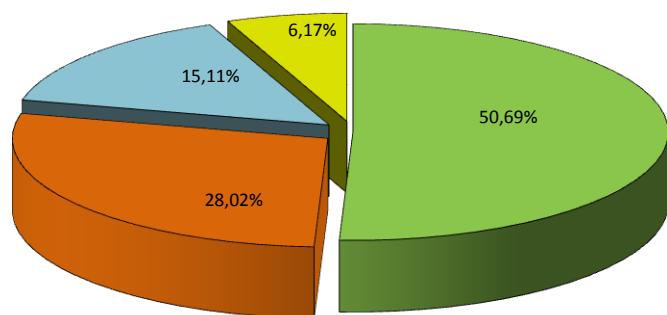
Jenis Piutang	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PIUTANG PPH PASAL 21	1.229.968.846.712	1.020.414.690.864	209.554.155.848	20,54%
PIUTANG PPH PASAL 22	104.120.004.440	66.827.848.091	37.292.156.349	55,80%
PIUTANG PPH PASAL 23	3.054.716.319.783	2.389.628.147.076	665.088.172.707	27,83%
PIUTANG PPH PASAL 25 OP	1.006.960.630.021	930.137.420.350	76.823.209.671	8,26%
PIUTANG PPH PASAL 25 BADAN	16.268.284.571.207	8.885.377.594.100	7.382.906.977.107	83,09%
PIUTANG PPH PASAL 26	125.143.589.474	0	125.143.589.474	0,00%
PIUTANG PPH FINAL	922.916.307.676	0	922.916.307.676	0,00%
PIUTANG PPH NON MIGAS LAINNYA	95.145.000	879.508.183.935	(879.413.038.935)	(99,99%)
PIUTANG PPN DALAM NEGERI	12.560.346.602.995	11.042.004.050.239	1.518.342.552.756	13,75%
PIUTANG PPN IMPOR	0	0	0	0,00%
PIUTANG PPBNM DALAM NEGERI	280.039.959.243	99.268.206.548	180.771.752.695	182,10%
PIUTANG PBB PEDESAAN	746.285.302.993	606.882.233.000	139.403.069.993	22,97%
PIUTANG PBB PERKOTAAN	4.527.189.629.491	2.929.676.818.000	1.597.512.811.491	54,53%
PIUTANG PBB PERKEBUNAN	212.754.667.994	178.163.623.000	34.591.044.994	19,42%
PIUTANG PBB KEHUTANAN	477.992.946.905	478.052.255.000	(59.308.095)	(0,01%)
PIUTANG PBB PERTAMBANGAN	64.058.196.664	45.810.576.000	18.247.620.664	39,83%
PIUTANG BPHTB	803.339.377.782	219.093.220.000	584.246.157.782	266,67%
PIUTANG PTLL	815.162.918	0	815.162.918	0,00%
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPH	2.788.050.134.100	2.089.472.783.166	698.577.350.934	33,43%
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPN	0	46.252.964.479	(46.252.964.479)	(100,00%)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PPBNM	0	26.396.512	(26.396.512)	(100,00%)
PIUTANG BUNGA PENAGIHAN PTLL	0	0	0	0,00%
TOTAL*)	45.173.077.395.397	31.906.597.010.360	13.266.480.385.037	41,57%

Tabel 47
Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Kurang dari 1 Tahun	Rp 12.239.111.738.000
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	Rp 9.776.181.927.000
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	Rp 10.213.857.380.000
5 Tahun atau Lebih	Rp 12.943.926.315.000
Jumlah*)	Rp 45.173.077.360.000

*) Terdapat selisih antara rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang pajak dengan rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebesar Rp35.397,00.

Grafik 20
Piutang Pajak
Direktorat Jenderal Pajak
Per 31 Desember 2008



■ Piutang PPh ■ Piutang PPnBM ■ Piutang PBB dan BPHTB ■ Piutang Bunga Penagihan

*Penghapusan
Piutang Pajak*

Nilai piutang pajak sebesar Rp45.173.077.395.397,00 tersebut, terdapat piutang sebesar Rp1.593.406.813.958,00 telah daluwarsa penagihannya. Dari piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp1.593.406.813.958,00 tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp538.684.964.810,00 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebesar Rp76.319.053.833,00. Dalam tahun 2008 telah dihapusbukukan piutang pajak sebesar Rp75.987.721.765,00.

Sengketa Pajak Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melayani Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan atas surat ketetapan pajak dan banding/gugatan yang belum mendapat keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah Rp16.091.195.868.298,00.

3. Jumlah piutang pajak di DJBC per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp10.318.356.917.933,00. Piutang pajak merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak (dalam rupiah) dapat dilihat pada tabel 48 berikut.

Tabel 48
Rincian Piutang Pajak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Per 31 Desember 2008

Akun	Nama Perkiraan	Rupiah
113122	Piutang PPh Pasal 22	605.746.817
113123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	60.097.792.650
113131	Piutang PPN Dalam Negeri	15.831.619.020
113132	Piutang PPN Impor	314.536.177.859
113139	Piutang PPN Lainnya	40.699.539.992
113142	Piutang PPnBM Impor	72.082.878.740
113149	Piutang PPnBM Lainnya	492.321.416
113161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	8.340.260.529.183
113162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	132.717.267.500
113163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	2.907.261.928
113164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	19.916.519.120
113166	Piutang Bea Materai	
113169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	30.949.290
113174	Piutang Bunga Penagihan PPN	548.229.952
113181	Piutang Bea Masuk	594.584.854.793
113183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	654.724.926.398
113184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	68.320.303.275
	Jumlah	10.318.356.917.933

C.2.1.5 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp37.821.028.316
.862,00*

Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp37.821.028.316.862,00 dan Rp34.458.942.679.003,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Posisi Piutang Bukan Pajak per unit Eselon I dapat dilihat pada tabel 49 berikut.

Tabel 49
Rincian Piutang PNBP Per Unit Eselon I
(dalam rupiah)

Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/ Penurunan
DJA	37.735.054.355.889	34.440.921.373.423	3.294.132.982.466
DJP	684.051.351	230.556.200	453.495.151
DJBC	81.577.174.250	112.335.000	81.464.839.250
DJPB	69.903.932	5.410.440	64.493.492
BAPEPAM-LK	3.633.182.000	17.665.784.000	(14.032.602.000)
BPPK	9.649.440	7.219.940	2.429.500
JUMLAH	37.821.028.316.862	34.458.942.679.003	3.362.085.637.859

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp37.821.028.316.862,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJA per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp37.735.054.355.889,00 dan Rp34.440.921.373.423,00. Piutang Bukan Pajak pada DJA terdiri dari Piutang Laba BUMN, Piutang Migas dan Piutang Panas Bumi. Rincian perkembangan Piutang Bukan Pajak pada DJA adalah sebagai berikut:

Jenis Piutang PNBP	31 Des 2008	31 Des 2007
Piutang Laba BUMN	217.066.840.844	3.926.400.819
Piutang Migas	37.400.345.749.745	34.396.221.235.009
Piutang Panas Bumi	117.641.765.300	40.773.737.595
Jumlah	37.735.054.355.889	34.440.921.373.423

a. Piutang Laba BUMN

Piutang laba BUMN merupakan piutang yang berasal dari piutang dividen dan denda sebesar Rp217.066.840.843,75. Piutang tersebut merupakan akumulasi piutang dari beberapa BUMN yang belum menyetorkan seluruh kewajiban dividen yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Beberapa BUMN tersebut telah mengajukan permohonan untuk dapat mengangsur/mencicil kewajiban tersebut selama beberapa tahun.

- Jumlah piutang dividen dan denda yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan untuk dicicil adalah sebesar Rp20.504.221.489,01, berasal dari 6 BUMN.
- Jumlah piutang dividen dan denda yang masih dalam proses penetapan/persetujuan dari Menteri Keuangan adalah sebesar Rp196.562.619.354,74, berasal dari 8 BUMN.

BUMN yang mengajukan permohonan untuk mencicil kewajiban dividen dan denda adalah BUMN yang mengalami kesulitan likuiditas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Atas permohonan tersebut, telah dilakukan audit guna menilai kemampuan likuiditas perusahaan. Sebanyak 6 BUMN yang telah diaudit tersebut sudah memperoleh persetujuan untuk mencicil kewajiban dalam beberapa tahun mendatang. Sementara dari 8 BUMN yang permohonannya masih diproses di Departemen Keuangan, 5 BUMN diantaranya telah selesai diaudit, sedangkan sisanya akan diaudit pada tahun 2009.

Rincian dan status piutang dividen dan denda selengkapnya disajikan dalam lampiran 13.

b. Piutang Migas

Piutang Migas sebesar Rp37.400.345.749.745,00 terdiri dari :

- Piutang pada Pertamina Rp36.351.942.410.296,00
- Piutang Non Pertamina Rp 1.048.403.339.450,00

Piutang pada Pertamina tersebut termasuk piutang ekspor minyak mentah sebesar USD172,928,993.24, piutang nilai lawan Rp5.997.412.769.300, piutang LPG sebesar USD5,963,317.65 dan *natural gas* sebesar USD70,768,910.54 yang akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal ini sesuai dengan KMK No. 454/KMK.06/2006 tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003 dan PMK No.23/PMK.06/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003.

Nilai lawan merupakan piutang kepada PT Pertamina (Persero) atas pembelian minyak mentah bagian negara termasuk minyak *Domestic Market Obligation* (DMO) yang dikirim ke kilang Pertamina untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri dengan harga *Indonesian Crude Price* (ICP) yang dinilai dalam Rupiah.

Terkait dengan proses konversi piutang menjadi PMN, saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penyertaan modal negara dimaksud. Disamping itu, nilai penyertaan modal tersebut telah dianggarkan dalam APBN 2009 sebagai rencana pengeluaran pembiayaan dalam negeri.

Piutang bukan pajak dari penerimaan SDA migas selengkapnya disajikan dalam lampiran 14.

c. Piutang Panas Bumi

Piutang Panas Bumi per 31 Desember 2008 sebesar US\$10.743.540,21 atau ekuivalen sebesar Rp117.641.765.299,50. Nilai rupiah tersebut diperoleh dengan mengkonversi nilai USD dengan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2008, yakni 1 USD= Rp10.950,00. Perbandingan piutang PNBP panas bumi per 31 Desember 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 50 berikut .

Tabel 50
Rincian Piutang PNBP Pertambangan Panas Bumi
Per 31 Desember 2008
(dalam US\$)

Nama Perusahaan	31 Des 2008	31 Des 2007
Chevron Geothermal Salak, Ltd	9.980.936,67	3,844,978.83
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	570.191,06	409.840.47
Dayabumi Salak Pratama, Ltd	185.630,59	154,012.40
PT Darajat Geothermal Indonesia	6.781,90	0
Jumlah	10.743.540,21	4,408,840.69

Piutang panas bumi tersebut terjadi karena pengusaha panas bumi dalam menghitung kewajibannya kepada Pemerintah membebankan *Pertamina Allowance* dalam perhitungan *Net Operating Income (NOI)*. Jumlah Piutang sebesar US\$10.743.540,21 belum dapat diakui sebagai PNBP karena masih harus diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan (PBB dan PPN). Piutang panas bumi tersebut belum disetor oleh pengusaha panas bumi sampai ada keputusan BPK terhadap keberatan pengusaha panas bumi. Penerimaan dari kegiatan usaha panas bumi/setoran bagian Pemerintah ditampung dalam Rekening No. 508.000084 di BI, untuk selanjutnya akan disetor ke Rekening BUN sebagai PNBP pertambangan panas bumi setelah diperhitungkan kewajiban

perpajakannya. Piutang tersebut merupakan setoran bagian pemerintah serta denda dari kegiatan usaha panas bumi. Rincian piutang Piutang Panas Bumi selengkapnya disajikan dalam lampiran 15.

- Saldo Piutang Bukan Pajak di DJP per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp684.051.351,00 dan Rp230.556.200,00 yang seluruhnya merupakan Piutang PNBP. Rincian Piutang Bukan Pajak per satuan kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 51
Rincian Piutang PNBP di DJP
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah
1	119091	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	678.439.351
2	119972	KPP Pratama Denpasar Barat	5.612.000
JUMLAH			684.051.351

- Saldo Piutang Bukan Pajak di DJBC per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp81.577.174.250,00 dan Rp112.335.000,00. Rincian piutang bukan pajak pada DJBC adalah sebagai berikut:

Pada Neraca Percobaan tingkat Eselon 1 DJBC terdapat perkiraan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp81.577.174.250,00. Nilai tersebut terdiri dari Piutang Penerimaan Bukan Pajak (113211) sebesar Rp31.125.016.430,00 dan Piutang Lainnya (113212) sebesar Rp50.452.157.820,00 yang digunakan untuk penyesuaian saldo pada Piutang Bukan Pajak.

- Saldo Piutang Bukan Pajak di DJPB per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp69.903.932,00 dan Rp5.410.440,00. Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang persekot/uang muka gaji. Rincian Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel 52 berikut :

Tabel 52
Rincian Piutang PNBP di DJPB
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

No.	Uraian Satker/Wilayah	31 Des 2008	31 Des 2007
1	Kantor Pusat	57.132.272	0
2	Kanwil XII DJPBN Bandung	729.720	5.410.440
3	Kanwil XXVIII DJPBN Ternate	12.041.940	0
Jumlah		69.903.932	5.410.440

- Saldo Piutang Bukan Pajak di Bapepam-LK per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp3.633.182.000,00 dan Rp17.665.784.000,00. Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK berasal dari Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bidang Asuransi dan Dana Pensiun).

Peraturan mengenai kebijakan piutang Bapepam-LK dapat dilihat pada lampiran 16.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 sebesar Rp3.813.120.000,00 terdiri dari :

1. Piutang Denda di Bidang Pasar Modal sebesar Rp1.291.120.000,00 meliputi :
 - Piutang denda yang belum jatuh tempo sebesar Rp1.099.800.000,00.
 - Piutang denda yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar dan belum dilimpahkan ke DJKN sebesar Rp187.000.000,00.
 - Piutang bunga atas denda belum terbayar sebesar Rp4.320.000,00.
2. Piutang Denda di Bidang Lembaga Keuangan yang tidak dilimpahkan ke DJKN karena belum ada peraturan pelaksanaannya sebesar Rp2.522.000.000,00 terdiri dari:
 - Bidang Asuransi sebesar Rp681.000.000,00.
 - Bidang Dana Pensiun sebesar Rp1.661.000.000,00.

Apabila dibandingkan dengan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2007 sebesar Rp17.665.784.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.852.664.000,00 atau 78,42 persen. Penurunan ini antara lain disebabkan pada tahun 2008 terjadi penurunan sanksi denda di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, cepat dan tepat waktunya pembayaran atas denda dan bunga atas denda. Hal ini mencerminkan semakin patuhnya pelaku pasar modal dan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu adanya reklasifikasi piutang atas denda di bidang asuransi menjadi aset lainnya sebesar Rp1.562.000.000,00 yang merupakan piutang atas perusahaan asuransi yang telah dicabut ijin usahanya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Des 2008 (Rp)	31 Des 2007 (Rp)	Kenaikan / (penurunan)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4X100%
1.	Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal	1.291.120.000	13.574.984.000	(12.283.864.000)	(90,49)
	- Piutang atas denda yang belum jatuh tempo	1.099.800.000	13.315.600.000	(12.215.800.000)	(91,74)
	- Piutang atas denda yang telah jatuh tempo tetapi belum terbayar (belum dilimpahkan ke DJKN)	187.000.000	252.100.000	(65.100.000)	(25,82)
	- Piutang atas bunga belum terbayar	4.320.000	7.284.000	(2.964.000)	(40,69)
2.	Piutang atas Denda di Bidang Lembaga Keuangan	2.522.000.000	4.090.800.000	(1.568.800.000)	(38,35)
	- Bidang Asuransi	861.000.000	2.443.000.000	(1.582.000.000)	(64,76)
	- Bidang Dana Pensiun	1.661.000.000	1.647.800.000	13.200.000	0,80
Jumlah (1+2)		3.813.120.000	17.665.784.000	(13.852.664.000)	(78,42)

Rincian Piutang Bukan Pajak Bapepam-LK per 31 Desember 2008 dapat dilihat pada lampiran 17.

6. Piutang Bukan Pajak di BPPK per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp9.649.440,00 dan Rp7.219.940,00. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Piutang PNBP di BPPK
Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Rupiah	Keterangan
1	PT Hutchison CP Telecommunication	679.500	Listrik Bulan 11
2	Koperasi	1.050.000	Sewa Ruang TW IV
3	Kantin BPPK Purnawarman	700.000	Sewa Ruang Bulan 11 dan 12
4	Piutang Pihak Ketiga	7.219.940	CV Kautsar Company
	Total	9.649.440	

C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

*Bagian Lancar
TGR
Rp236.813.241,00*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp236.813.241,00 dan Rp1.465.194.852,00. Saldo per 31 Desember 2008 merupakan saldo Tagihan TGR Kementerian Keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca (sampai dengan 31 Desember 2009).

Apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun sebelumnya maka terjadi penurunan sebesar Rp(1.228.381.611) atau sebesar 83,84%. Penurunan tersebut antara lain terjadi karena adanya reklasifikasi Tagihan TGR Sekretariat Jenderal sebesar Rp677.406.660,00 yang per 31 Desember 2007 disajikan pada akun Bagian Lancar TGR ke Tuntutan Ganti Rugi dalam kelompok Aset Lainnya.

Rincian Bagian Lancar TGR pada unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 54 berikut.

Tabel 54
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	5.500.000	677.406.660	(671.906.660)	(99,9%)
ITJEN	0	0	0	0,00%
DJA		0	0	0,00%
DJP	118.258.820	67.821.200	50.437.620	74,37%
DJBC	39.338.481	458.697.146	(419.358.665)	(91,42%)
DJKPK	0	0	0	0,00%
DJPU	0	0	0	0,00%
DJPB	27.995.100	48.961.800	(20.966.700)	(42,82%)
DJKN	26.887.500	0	26.887.500	100,00%
BAPEPAMLK	0	0	0	0,00%
BPPK	18.833.340	212.308.046	(193.474.706)	(91,13%)
BKF	0	0	0	0,00%
	236.813.241	1.465.194.852	(1.228.381.611)	(83,84%)

Dari Saldo Bagian Lancar TGR dalam TA 2008 Kanwil XII DJPBN Bandung per 31 Desember 2007 Rp31.125.000,00 dihapuskan, karena pegawai bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, dan kerugian dimaksud dalam TA 2008 akan menjadi tanggungan negara. Di samping itu TGR pada Kantor Pusat DJPB diindikasikan tidak dapat ditagih karena pegawai yang bersangkutan telah pensiun, meninggal dunia, dan sebagian dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

C.2.1.7 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari
Kegiatan
Operasional BLU
Rp21.505.689.090

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp21.505.689.090,00 dan sebesar Rp20.087.902.083,00.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 dapat dilihat pada tabel 55 berikut.

Tabel 55
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	Setjen (PIP)	21.489.519.090	20.087.902.083	1.401.617.007
11	BPPK (STAN)	16.170.000	-	16.170.000
	Jumlah	21.505.689.090	20.087.902.083	1.417.787.007

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU di Sekretariat Jenderal sebesar Rp21.489.519.090,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari Kegiatan Operasional PIP. Kegiatan PIP berupa kegiatan investasi jangka panjang baik investasi langsung maupun investasi dalam bentuk Surat Berharga yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Nilai sebesar Rp 21.490.716.868,00 tersebut merupakan piutang bagi hasil dari Badan Pengatur Jalan Tol (Piutang BLU Pengelola Dana Investasi) yang dihitung secara akrual pada tanggal 31 Desember 2008.

C.2.1.8 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Lainnya

Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional BLU
Lainnya
Rp27.310.262.126

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Kementerian Keuangan hanya berasal dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Pusat Investasi Pemerintah. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp27.310.262.126,00 dan Rp5.659.120.120,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan non operasional PIP, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut berasal dari piutang jasa giro yang dihitung secara akrual pada tanggal 31 Desember 2008.

C.2.1.9 Piutang Bukan Pajak Lainnya

Piutang Bukan
Pajak Lainnya
Rp0

Jumlah Piutang Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp114.736.007,00. Dalam laporan keuangan TA 2008, Piutang Bukan Pajak Lainnya termasuk dalam kelompok akun Piutang Bukan Pajak sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS) yang berlaku mulai TA 2008.

C.2.1.10 Persediaan

Persediaan
RP136.695.886.0
25,00

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp136.695.886.025,00 dan Rp107.466.860.517,00. Nilai tersebut merupakan hasil *stock opname* per 31 Desember 2008 yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja lingkup Departemen Keuangan telah menyelenggarakan akuntansi persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN. Saldo persediaan per 31 Desember 2008 tersebut akan digunakan sebagai saldo awal tahun 2009.

Rincian Persediaan per unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel 56 berikut.

Tabel 56
Persediaan Per Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/ Penurunan	%
SETJEN	1.044.669.262	689.692.927	354.976.335	51,47%
ITJEN	283.736.338	395.826.382	(112.090.044)	(28,32%)
DJA	836.968.647	562.296.596	274.672.051	48,85%
DJP	88.200.439.352	63.168.558.601	25.031.880.751	39,63%
DJBC	25.519.340.825	23.747.583.166	1.771.757.659	7,46%
DJPK	92.501.780	53.344.887	39.156.893	73,40%
DJPU	522.098.058	561.375.630	(39.277.572)	(7,00%)
DJPB	13.867.612.911	13.151.492.019	716.120.892	5,45%
DJKN	3.668.265.772	2.614.614.357	1.053.651.415	40,30%
BAPEPAMLK	711.794.015	1.035.878.185	(324.084.170)	(31,29%)
BPPK	1.410.640.810	1.281.554.662	129.086.148	10,07%
BKF	537.818.255	204.643.105	333.175.150	162,81%
	136.695.886.025	107.466.860.517	29.229.025.508	27,20%

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2008 per jenis persediaan dapat dilihat pada tabel 57 berikut.

Tabel 57
Persediaan Per Jenis
Per 31 Desember 2008

Akun	Jenis Persediaan	31 Des 2008
115111	Barang Konsumsi	107.446.458.732
115112	Amunisi	1.932.328.905
115113	Bahan Untuk Pemeliharaan	5.777.261.036
115114	Suku Cadang	832.253.883
115121	Pita Cukai, Materai dan Leges	12.807.844.013
115124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	618.395.802
115131	Bahan Baku	3.724.308.500
115191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	13.693.300
115192	Persediaan Barang Hasil Sitaan	2.413.904.003
115199	Persediaan Lainnya	1.129.437.851
	Jumlah	136.695.886.025

C.2.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Rp828.379.875.579,00
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2008 sebesar Rp828.379.875.579,00 merupakan investasi non permanen yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah. Investasi tersebut terdiri dari Pinjaman kepada BLU lainnya sebesar Rp707.595.178.400,00 dan Investasi Non Permanen lainnya sebesar Rp120.784.697.179,00.

C.2.2.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp0
Akun Dana Bergulir per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp0 dan Rp3.451.867.887.420,00. Dana Bergulir merupakan dana yang berasal dari BA 99 (Rp4 triliun) yang dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, Badan Usaha dan BLU oleh PIP yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, PNBP dan tujuan lainnya. Dalam Laporan Keuangan TA 2008 dana ini disajikan pada akun Dana Kelolaan BLU dalam kelompok Aset Lainnya.

C.2.2.2 Pinjaman Kepada Badan Layanan Umum Lainnya

Pinjaman kepada BLU Rp707.595.178.400,00
Pinjaman kepada BPJT per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp707.595.178.400,00 yang bersumber dari dana bergulir (BA 99) sebesar Rp700.000.000.000,00 dan pendapatan bagi hasil PIP (7,5 persen) yang digulirkan kembali sebesar Rp7.595.178.400,00. Pinjaman kepada BPJT 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp593.630.343.750,00 yang bersumber dari dana bergulir (BA 99) sebesar Rp590.000.000.000,00 dan pendapatan bagi hasil PIP (7,5 persen) yang digulirkan kembali sebesar Rp3.630.343.750,00. Pinjaman kepada BLU Lainnya merupakan bentuk Investasi Non Permanen PIP berupa Penanaman dalam proyek yang dialihkan kepada pihak ketiga yang berasal dari dana bergulir dan pendapatan PIP yang digulirkan kembali. Penanaman dalam proyek yang dialihkan kepada pihak ketiga yaitu kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan imbal hasil berupa pendapatan bagi hasil atas hasil yang diperoleh dari proyek yang dijalankan dari pembebasan jalan tol.

C.2.2.3 Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp120.784.697.179,00
Investasi non permanen lainnya adalah investasi non permanen yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, antara lain sebagai penyertaan modal untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian. Investasi non permanen lainnya PIP berupa investasi dalam bentuk saham BUMN dengan nilai per 31 Desember 2008 sebesar Rp120.784.697.179,00 (penanaman ini berupa investasi pada surat berharga dalam bentuk saham baru dilaksanakan pada tahun 2008). Nilai Pasar Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp171.375.320.000,00 bersumber dari dana bergulir (BA 99) sebesar Rp120.784.697.179,00 dan kenaikan harga saham (*unrealized gain*) sebesar Rp50.590.622.821,00. Rincian saham BUMN yang dimiliki PIP per tanggal 31 Desember 2008 dapat dilihat dalam tabel 58 berikut.

Tabel 58
Daftar Saham BUMN
(dalam rupiah)

No	Kode	Nama Saham	Jumlah	Nilai Beli	Nilai Pasar per 31 Des 2008 (Rp)
			(lot)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7) = (5) x (6)	(9) = (8) x (5)
1	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT	5.422	11.263.025.715	18.705.900.000
2	PGAS	Perusahaan Gas Negara PT Tbk	16.955	10.353.926.805	15.768.150.000
3	JSMR	Jasa Marga Tbk PT	33.270	10.991.177.010	15.137.850.000
4	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk PT	42.997	9.900.188.241	14.618.980.000
5	ANTM	Aneka Tambang Tbk PT	11.756	5.001.795.930	6.407.020.000
6	TINS	Timah Tbk PT	17.953	8.177.600.477	9.694.620.000
7	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk PT	8.343	12.319.461.518	19.084.612.500
8	BMRI	Bank Mandiri Tbk PT	26.719	17.921.421.903	27.052.987.500
9	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk PT	13.016	34.856.099.580	44.905.200.000
		Total	176.431	120.784.697.179	171.375.320.000

C.2.3 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp29.687.538.231..
724,00

Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp29.687.538.231.724,00 dan Rp12.926.903.489.397,00. Nilai tersebut sudah termasuk Koreksi Nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN setidak-tidaknya sebesar Rp14.775.474.068.077,00. Nilai koreksi ini merupakan jumlah koreksi yang dilakukan melalui SIMAK-BMN. Adapun koreksi yang dilakukan oleh satuan kerja pada saat masih mengimplementasikan SABMN belum dapat diketahui jumlahnya.

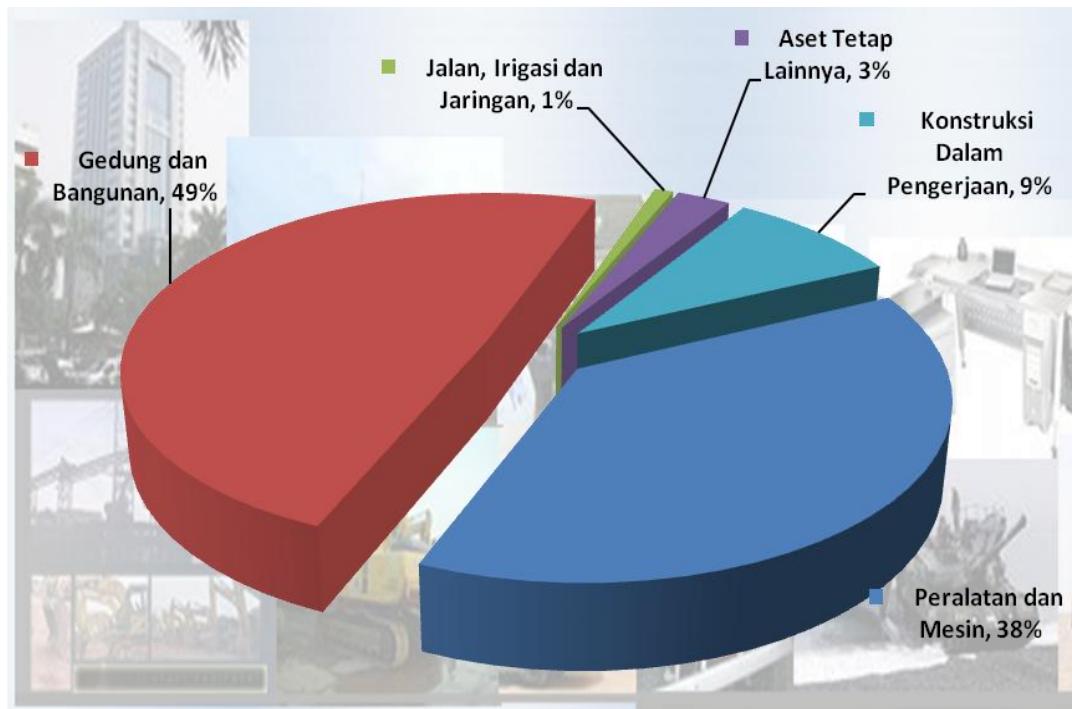
Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (depresiasi). Dalam rangka penyajian nilai wajar aset tetap milik Pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004, termasuk yang dimiliki Kementerian Keuangan. Penjelasan mengenai hasil koreksi nilai aset tetap sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilaian Aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dijelaskan dalam pengkapan lainnya.

Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel 59 dan grafik 21 berikut.

Tabel 59
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2008 dan 2007

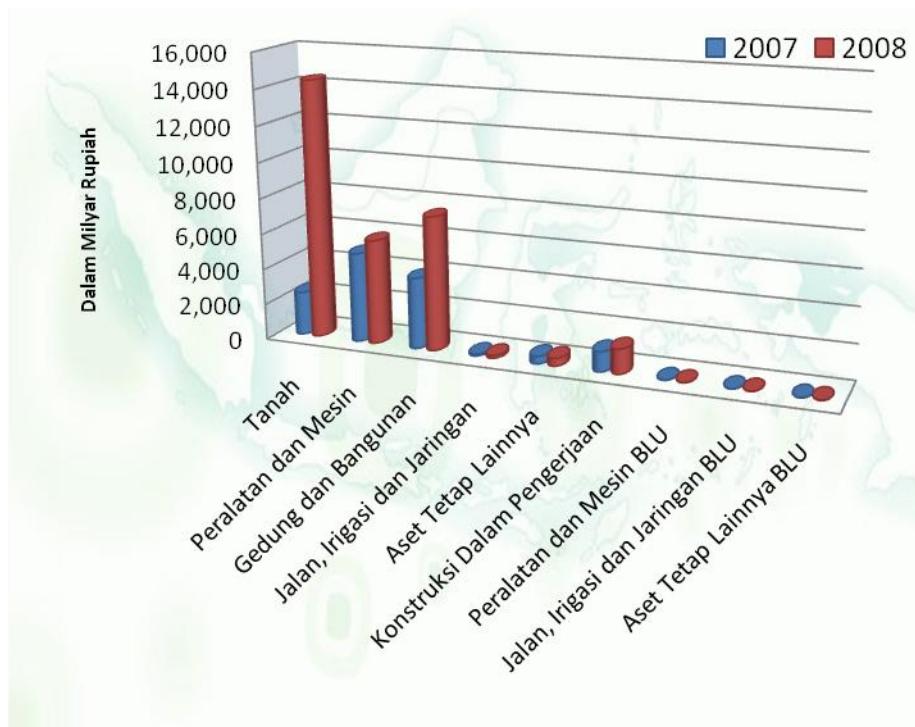
No	Uraian	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	14.429.849.284.717	2.163.847.241.366	12.266.002.043.351
2	Peralatan dan Mesin	5.918.215.830.895	5.114.395.160.372	803.820.670.523
3	Gedung dan Bangunan	7.565.818.510.870	3.848.353.886.512	3.717.464.624.358
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	150.584.152.346	100.318.650.329	50.265.502.017
5	Aset Tetap Lainnya	242.709.155.830	405.364.820.518	(162.655.664.688)
6	Konstruksi Dalam Penggeraan	1.376.403.863.346	1.293.271.578.300	83.132.285.046
7	Peralatan dan Mesin BLU	3.709.034.840	1.334.552.000	2.374.482.840
8	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	206.174.500	0	206.174.500
9	Aset Tetap Lainnya BLU	42.224.380	17.600.000	24.624.380
Jumlah		29.687.538.231.724	12.926.903.489.397	16.760.634.742.327

Grafik 21
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset



Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset dapat dilihat pada grafik 22 berikut:

Grafik 22
Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap



C.2.3.1 Tanah

Tanah Rp14.429.849.284.717,00

Jumlah Tanah per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp14.429.849.284.717,00 dan Rp2.163.847.241.366,00. Nilai tersebut sudah termasuk Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN sebesar Rp11.996.394.011.600,00.

Rincian jumlah Tanah yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan setelah koreksi dapat dilihat pada tabel 60 berikut.

Tabel 60
Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	5,061,283,871,700	278,206,577,366	4,783,077,294,334
02	ITJEN	4,052,985,448	75,599,500	3,977,385,948
04	DJP	3,736,360,295,112	1,404,110,611,920	2,332,249,683,192
05	DJBC	2,694,381,467,697	144,950,797,656	2,549,430,670,041
08	DJPB	1,966,795,888,752	189,280,782,620	1,777,515,106,132
09	DJKN	158,143,292,647	25,760,926,319	132,382,366,328
10	BAPEPA M-LK	99,811,567,750	208,919,239	99,602,648,511
11	BPPK	707,895,915,611	121,213,313,303	586,682,602,308
12	BKF	1,124,000,000	39,713,443	1,084,286,557
JUMLAH		14,429,849,284,717	2,163,847,241,366	12,266,002,043,351

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan *Audited* TA 2007 dengan Saldo Awal Laporan Keuangan TA 2008 sebesar Rp427.579.460.405,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	<i>Audited 31 Des 2007</i>	Saldo Awal SIMAK-BMN 2008	Selisih
Setjen	278.206.577.366	410.832.056.585	132.625.479.219
DJP	1.404.110.611.920	711.901.697.793	(692.208.914.127)
DJBC	144.950.797.656	330.509.477.984	185.558.680.328
DJPB	189.280.782.620	135.726.076.795	(53.554.705.825)
Jumlah	2.016.548.769.562	1.588.969.309.157	(427.579.460.405)

1. Selisih lebih sebesar Rp132.625.479.219,00 pada Sekretariat Jenderal disebabkan karena adanya input data hasil penilaian DJKN pada SABMN TA 2007 yang sebelumnya dimasukkan dalam SIMAK BMN TA 2008.
2. Selisih kurang sebesar Rp692.208.914.127,00 pada Ditjen Pajak disebabkan karena adanya input data hasil penilaian DJKN pada SIMAK-BMN TA 2008 yang sebelumnya dimasukkan dalam SABMN TA 2007 dan pada LK Kementerian Keuangan 2007 (*Audited*) telah memasukkan hasil penilaian DJKN untuk Tanah, sedangkan DJP memasukkan hasil penilaian tersebut pada LK Tahunan TA 2008.

3. Selisih kurang sebesar Rp53.554.705.825,00 pada DJPB disebabkan pada LK Kementerian Keuangan 2007 (*Audited*) telah memasukkan hasil penilaian DJKN untuk Tanah pada KPPN Jakarta I sedangkan DJPB memasukkan hasil penilaian tersebut pada LK Semester I TA 2008. Sehingga pada LK Kementerian Keuangan 2008 memerlukan koreksi saldo awal 2008 agar tidak terjadi *double accounting*.
4. Selisih lebih sebesar Rp185.558.680.328,00 pada DJBC disebabkan beberapa satker melakukan penginputan hasil revaluasi aset oleh DJKN melalui aplikasi SABMN pada jenis transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas, sehingga merubah saldo awal.

Mutasi/perubahan Tanah dapat disajikan pada tabel 61 berikut.

Tabel 61
Mutasi/Perubahan Tanah

SALDO AWAL	1.736.267.780.961
Mutasi Tambah	12.804.139.969.139
Mutasi Saldo Awal	504.550.439.373
Pembelian	32.035.191.524
Transfer Masuk	172.692.369.757
Hibah Masuk	72.583.286
Penyelesaian Pembangunan	632.006.219
Reklasifikasi Masuk	307.634.010.344
Perolehan Lainnya	175.911.500
Pertukaran	1.016.776.500
Pengembangan Nilai Aset	2.492.856.400
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	1.125.724.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	528.034.741.582
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	11.253.677.358.654
Mutasi Kurang	(110.558.465.383)
Pengurangan Nilai Aset	(37.209.400)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(5.547.875.000)
Penghapusan	(1.628.998.554)
Transfer Keluar	(86.612.566.517)
Hibah Keluar	(399.110.000)
Reklasifikasi Keluar	(13.993.263.702)
Pengentian Penggunaan	(1.000.000)
Total Mutasi	12.693.581.503.756
SALDO AKHIR	14.429.849.284.717

Beberapa catatan penting atas Aset Tanah adalah sebagai berikut:

1. Terdapat koreksi pencatatan aset tetap tanah sesuai dengan surat Nomor: KEP-19B/GKN/2008 Tanggal 30 Juni 2008 pada GKN Manado, ini terjadi karena dalam SABMN TA 2007 sebelumnya terjadi pencatatan ganda antara GKN Manado dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Adanya koreksi nilai GKN Kupang sesuai dengan hasil inventarisasi dan penilaian dari DJKN yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Kanwil DJPB Kupang.

C.2.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp5.918.215.830.895,00
5,00

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp5.918.215.830.895,00 dan Rp5.114.395.160.372,00. Jumlah tersebut sudah termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN sebesar (Rp479.697.016.686,00).

Rincian jumlah Peralatan dan Mesin yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 62 berikut.

Tabel 62
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	349,680,195,418	298,099,143,831	51,581,051,587
02	ITJEN	25,059,413,953	25,908,815,976	(849,402,023)
03	DJA	28,465,898,424	25,477,615,321	2,993,015,142
04	DJP	3,217,317,808,089	2,689,755,519,254	527,562,288,835
05	DJBC	1,511,448,022,023	1,325,091,712,288	186,356,309,735
06	DJPK	13,286,366,247	11,218,610,731	2,067,755,516
07	DJPU	19,647,940,174	14,777,002,186	4,870,937,988
08	DJPB	487,951,215,189	484,154,640,198	3,796,574,991
09	DJKN	133,956,086,192	111,070,356,230	22,885,729,962
10	BAPEPAM-LK	37,479,418,753	39,463,303,311	(1,983,884,558)
11	BPPK	67,384,013,141	67,775,458,989	(391,445,848)
12	BKF	26,539,453,292	21,602,982,057	4,936,471,235
JUMLAH		5.918.215.830.895	5.114.395.160.372	803.825.402.562

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan *Audited* TA 2007 dengan Saldo Awal Laporan SIMAK-BMN TA 2008 sebesar Rp138.905.432.849,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	Audited 31 Des 2007	Saldo Awal SIMAK-BMN 2008	Selisih
Setjen	298.099.143.831	298.507.072.064	407.928.233
DJP	2.689.755.519.254	2.647.742.605.198	(42.012.914.056)
DJBC	1.325.091.712.288	1.230.944.209.625	(94.147.502.663)
DJPB	484.154.640.198	481.001.695.835	(3.152.944.363)
Jumlah	4.797.101.015.571	4.658.195.582.772	(138.905.432.849)

1. Selisih lebih sebesar Rp407.928.233,00 pada Sekretariat Jenderal disebabkan karena adanya input data hasil penilaian DJKN pada SABMN TA 2007 yang sebelumnya dimasukkan dalam SIMAK BMN TA 2008.
2. Selisih kurang sebesar Rp42.012.914.056,00 pada Ditjen Pajak disebabkan karena adanya input data hasil penilaian DJKN pada SIMAK-BMN TA 2008 yang sebelumnya dimasukkan dalam SABMN TA 2007.

3. Selisih kurang sebesar Rp94.147.502.663,00 pada DJBC disebabkan beberapa satker melakukan penginputan hasil revaluasi aset oleh DJKN melalui aplikasi SABMN pada jenis transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas, sehingga merubah saldo awal.
4. Selisih kurang sebesar Rp3.152.944.363,00 pada DJPB disebabkan karena adanya koreksi saldo awal hasil penilaian DJKN pada aplikasi SABMN, transaksi penambahan saldo awal pada beberapa UAKPB, dan kegagalan dalam proses tutup tahun aplikasi SABMN.

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin dapat disajikan pada tabel 63 berikut.

Tabel 63
Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	4.975.489.727.523
Mutasi Tambah	2.606.666.737.744
Mutasi Saldo Awal	85.128.114.156
Pembelian	910.047.643.134
Transfer Masuk	1.131.385.653.697
Hibah Masuk	21.816.604.146
Rampasan	4.771.747.270
Penyelesaian Pembangunan	235.357.106.297
Pembatalan Penghapusan	101.561.420
Reklasifikasi Masuk	170.357.347.277
Perolehan Lainnya	546.724.300
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra Ke Ekstra/Sebaliknya	1.443.616.246
Pengembangan Nilai Aset	13.652.943.283
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	98.584.450
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	31.383.165.187
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN	575.926.880
Mutasi Kurang	(1.658.601.034.896)
Pengurangan Nilai Aset	(7.269.354.480)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(27.427.580.080)
Penghapusan	(30.685.728.753)
Transfer Keluar	(858.134.700.071)
Hibah Keluar	(679.000.000)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN	(480.272.943.566)
Reklasifikasi Keluar	(17.006.907.265)
Pengentian Penggunaan	(32.743.819.051)
Penghapusan Semu Intra Ekstra	(1.342.568.772)
Saldo Akhir	5.923.555.430.371

Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar Rp5.339.599.476,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
Setjen	349.680.195.418	351.523.118.505	(1.842.923.087)
Itjen	25.059.413.953	25.087.511.315	(28.097.362)
DJA	28.465.898.424	29.266.744.359	(800.845.935)

DJP	3.217.317.808.089	3.217.329.008.089	(11.200.000)
DJPK	13.286.366.247	13.432.597.126	(146.230.879)
DJPB	487.951.215.189	488.238.546.253	(287.331.064)
Bapepam-LK	37.479.418.753	39.671.260.902	(2.191.842.149)
Jumlah	4.159.240.316.073	4.164.548.786.549	(5.308.470.476)

Selisih kurang sebesar Rp5.308.470.476,00 merupakan Reklasifikasi asset yang rusak berat ke dalam aset Lain-lain sebesar Rp5.286.396.976,00 dan sebesar Rp22.073.500,00 merupakan barang inventaris berupa kendaraan yang hilang di DJP dan DJPB, dimana dalam neraca berdasarkan SAK, nilai tersebut telah dikeluarkan namun dalam laporan SIMAK-BMN belum dihapuskan.

C.2.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp7.565.818.510.870.
0,00

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp7.565.818.510.870,00 dan Rp3.848.353.886.512,00. Jumlah tersebut sudah termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN sebesar Rp3.257.596.384.553,00.

Rincian jumlah Gedung dan Bangunan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 64 berikut.

Tabel 64
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	2,158,587,812,279	1,335,660,286,897	822,927,525,382
02	ITJEN	1,554,356,860	599,793,500	954,563,360
03	DJA	950,533,000	-	950,533,000
04	DJP	3,065,068,755,475	1,665,539,760,965	1,399,528,994,510
05	DJBC	995,057,252,927	374,384,722,150	620,672,530,777
08	DJPB	938,856,697,823	357,296,176,662	581,560,521,161
09	DJKN	162,094,322,270	39,743,707,881	122,350,614,389
10	BAPEPAM-LK	346,673,000	18,211,468	328,461,532
11	BPPK	242,933,377,236	75,086,377,205	167,847,000,031
12	BKF	368,730,000	24,849,784	343,880,216
JUMLAH		7.565.818.510.870	3.848.353.886.512	3.717.464.624.358

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan Audited TA 2007 dengan Saldo Awal laporan SIMAK-BMN TA 2008 sebesar Rp33.675.626.349,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	Audited 31 Des 2007	Saldo Awal SIMAK- BMN 2008	Selisih
Setjen	1.335.660.286.897	1.452.864.264.590	(117,203,977,693)

DJP	1.665.539.760.965	1.493.116.425.213	172.423.335.752
DJBC	374.384.722.150	423.366.928.167	(48.982.206.017)
DJPB	357.296.176.662	330.384.338.860	26.911.837.802
BPPK	75.086.377.205	74.559.740.700	526.636.505
Jumlah	3,807,967,323,879	3,739,475,664,711	33.675.626.349

1. Selisih kurang sebesar Rp117.203.977.693,00 pada Sekretariat Jenderal karena adanya penginputan data hasil penilaian DJKN pada SABMN TA 2007 yang sebelumnya dimasukkan dalam SIMAK BMN TA 2008.
2. Selisih lebih sebesar Rp172.423.335.752,00 pada Ditjen Pajak karena adanya input data hasil penilaian DJKN pada SIMAK-BMN TA 2008 yang sebelumnya dimasukkan dalam SABMN TA 2007 dan pada LK Kementerian Keuangan 2007 (*Audited*) telah dimasukkan hasil penilaian DJKN untuk Tanah, sementara DJP memasukkan hasil penilaian tersebut pada LK Tahunan TA 2008.
3. Selisih kurang sebesar Rp48.982.206.017,00 pada DJBC karena beberapa satker melakukan penginputan hasil revaluasi aset oleh DJKN melalui aplikasi SABMN pada jenis transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas, sehingga mengubah saldo awal.
4. Selisih lebih sebesar Rp26.911.837.802,00 pada DJPB disebabkan pada LK Kementerian Keuangan 2007 (*Audited*) telah dimasukkan hasil penilaian DJKN untuk Tanah KPPN Jakarta I, sementara DJPB memasukkan hasil penilaian tersebut pada LK Semester I Tahun 2008 DJPB.
5. Selisih lebih sebesar Rp526.636.505,00 pada BPPK disebabkan rehabilitasi gedung pada Pusdiklat Pajak Tahun 2007 dikapitalisasi ke aset Gedung dan Bangunan dalam neraca. Pada awal Tahun 2008 nilai tersebut direklasifikasi ke Aset Tetap Renovasi sebagai bagian dari Aset Tetap Lainnya.

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel 65 berikut.

Tabel 65
Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	3.814.678.260.163
Mutasi Tambah	4.250.238.943.053
Mutasi Saldo Awal	206.905.406.633
Pembelian	4.342.052.847
Transfer Masuk	402.142.655.467
Hibah Masuk	31.897.877.143
Penyelesaian Pembangunan	594.811.830.788
Pembatalan Penghapusan	2.964.511
Reklasifikasi Masuk	36.480.944.054
Perolehan Lainnya	713.096.925
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra Ke Ekstra/Sebaliknya	1.916.059.011
Pengembangan Nilai Aset	189.899.295.532
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	41.427.594.149
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	309.580.147.924]
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN	2.429.631.311.269
Koreksi Pencatatan	452.894.000
Bangun Serah Guna	34.812.800

Mutasi Kurang	(497.687.354.244)
Pengurangan Nilai Aset	(2.489.820.073)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(5.382.633.731)
Penghapusan	(18.059.679.740)
Transfer Keluar	(326.925.305.373)
Hibah Keluar	(450.000.000)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN2	(13.382.273.708)
Reklasifikasi Keluar	(92.954.807.826)
Pengentian Penggunaan	(2.016.580.691)
Penghapusan Semu Intra Ekstra	(9.676.362)
Koreksi Pencatatan	(36.016.576.740)
Saldo Akhir	7.567.229.848.972

Terdapat perbedaan saldo akhir neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.411.338.102,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
Setjen	2.158.587.812.279	2.159.535.641.129	(947.828.850)
DJPB	938.856.697.823	939.320.207.075	(463.509.252)
Jumlah	3.097.444.510.102	3.098.855.848.204	1.411.338.102

Selisih tersebut terjadi karena adanya reklassifikasi dari Aset Tetap ke dalam Aset Lainnya karena rusak berat.

Beberapa catatan penting atas aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Terdapat transfer masuk pada Direktorat Jenderal Anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Perpendaharaan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-8/PB.1/2008 yang berupa Rumah Jabatan yang terletak di Jl. Bukit Hijau II No. 8 Jakarta Selatan.

C.2.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp150.584.152.346,00*

Jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp150.584.152.346,00 dan Rp100.318.650.329,00. Jumlah tersebut sudah termasuk koreksi nilai dari Tim Penertiban Aset DJKN sebesar Rp1.754.118.977,00.

Rincian jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 66 berikut.

Tabel 66
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	29,987,368,305	25,815,388,713	4,171,979,592
04	DJP	24,231,579,490	22,934,570,343	1,297,009,147
05	DJBC	80,077,560,839	37,679,382,424	42,398,178,415
08	DJPB	8,184,044,180	5,746,897,727	2,437,146,453

09	DJKN	1,169,411,800	84,823,100	1,084,588,700
11	BPPK	6,934,187,732	8,057,588,022	(1,123,400,290)
JUMLAH		150,584,152,346	100.318.650.329	50.265.502.017

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan *Audited* TA 2007 dengan Saldo Awal laporan SIMAK-BMN TA 2008 sebesar Rp3.134.737.787,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	Audited 31 Des 2007	Saldo Awal SIMAK- BMN 2008	Selisih
DJP	22.934.570.343	20.103.823.257	2,830,747,086
DJBC	37.679.382.424	37.726.005.480	(46.623.056)
DJPB	5.746.897.727	5.396.283.970	350.613.757
Jumlah	66,360,850,494	63,226,112,707	3,134,737,787

1. Selisih lebih sebesar Rp2.830.747.086,00 pada DJP karena adanya input data hasil penilaian DJKN pada SIMAK-BMN TA 2008 yang sebelumnya dimasukkan dalam SABMN TA 2007.
2. Selisih kurang sebesar Rp46.623.056,00 pada DJBC disebabkan beberapa satker melakukan penginputan hasil revaluasi aset oleh DJKN melalui aplikasi SABMN pada jenis transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas
3. Selisih lebih sebesar Rp350.613.757,00 pada DJPB karena adanya koreksi saldo awal hasil penilaian DJKN pada aplikasi SABMN, transaksi penambahan saldo awal pada beberapa UAKPB, dan kegagalan dalam proses tutup tahun aplikasi SABMN.

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat disajikan pada tabel 67 berikut.

Tabel 67
Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal	97.183.912.542
Mutasi Tambah	83.422.132.935
Mutasi Saldo Awal	11.471.250.338
Pembelian	2.628.126.613
Transfer Masuk	30.640.814.248
Penyelesaian Pembangunan	30.364.422.871
Reklasifikasi Masuk	195.113.119
Perolehan Lainnya	107.976.000
Pengembangan Nilai Aset	2.271.484.285
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	624.473.151
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN	5.118.472.310
Mutasi Kurang	(29.970.203.131)
Pengurangan Nilai Aset	(399.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(251.468.659)
Penghapusan	(69.958.466)
Transfer Keluar	(25.963.717.569)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN	(3.364.353.333)
Reklasifikasi Keluar	(90.064.504)
Pengentian Penggunaan	(81.141.600)

Saldo Akhir**150.635.842.346**

Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2008 sebesar Rp51.690.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
Setjen	29.987.368.305	30.039.058.305	(51.690.000)
Jumlah	29.987.368.305	30.039.058.305	(51.690.000)

Selisih tersebut terjadi karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya untuk aset yang kondisinya rusak berat.

C.2.3.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp242.709.155.830,
00*

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp242.709.155.830,00 dan Rp405.360.820.518,00. Dalam jumlah tersebut sudah termasuk koreksi nilai oleh Tim Penertiban Aset DJKN sebesar (Rp573.430.367,00).

Rincian jumlah Aset Tetap Lainnya yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 68 berikut.

Tabel 68
Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	2,545,383,827	248,391,917	2,296,991,910
02	ITJEN	505,008,431	132,935,707	372,072,724
03	DJA	265,889,633	214,575,593	51,314,040
04	DJP	191,293,118,826	374,736,959,252	(183,443,840,426)
05	DJBC	5,586,894,233	3,094,907,646	2,491,986,587
06	DJPK	4,588,559,911	1,755,182,425	2,833,377,486
07	DJPU	668,730,741	2,472,485,700	(1,803,754,959)
08	DJPB	5,921,072,628	3,842,239,004	2,078,833,624
09	DJKN	2,343,840,783	2,022,421,923	321,418,860
10	BAPEPAM-LK	15,852,877,419	7,572,900,615	8,279,976,804
11	BPPK	12,826,883,863	9,199,520,836	3,627,363,027
12	BKF	310,895,535	72,299,900	238,595,635
JUMLAH		242,709,155,830	405.364.820.518	(162.655.664.688)

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan Audited TA 2007 dengan Saldo Awal laporan SIMAK-BMN TA 2008 sebesar Rp12.921.665.666,00 dengan rincian sebagai berikut.

Eselon I	Audited 31 Des 2007	Saldo Awal SIMAK-BMN 2008	Selisih
DJA	214.575.593	185.547.055	29,028,538
DJP	374.736.959.252	374.108.104.493	628,854,759
DJBC	3.094.907.646	4.411.300.797	(1,316,393,151)
DJPK	1.755.182.425	171.397.525	1,583,784,900
DJPU	2.472.485.700	0	2,472,485,700
DJPB	3.842.239.004	3.791.410.004	50,829,000
DJKN	2.022.421.923	122.246.618	1,900,175,305
BAPEPAM-LK	7.572.900.615	0	7,572,900,615
BPPK	9.199.520.836	9.199.520.836	12,921,665,666
Jumlah	404,911,192,994	391,989,527,328	12,921,665,666

Selisih saldo awal tersebut terjadi karena:

1. Jurnal neraca melalui aplikasi SAK untuk aset tetap renovasi.
2. Beberapa satker pada DJBC melakukan penginputan hasil revaluasi aset oleh DJKN melalui aplikasi SABMN pada jenis transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas,

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya dapat disajikan pada tabel 69 berikut.

Tabel 69
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	392.443.154.852
Mutasi Tambah	4.973.235.252
Mutasi Saldo Awal	39.456.784
Pembelian	2.854.947.878
Transfer Masuk	2.078.530.590
Reklasifikasi Masuk	300.000
Mutasi Kurang	(187.270.559.796)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(451.799.068)
Penghapusan	(594.487.996)
Transfer Keluar	(307.981.853)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset DJKN2	(1,023,938,478)
Reklasifikasi Keluar	(184.831.327.482)
Pengentian Penggunaan	(442.289.845)
Saldo Akhir	209.695.322.197

Terdapat perbedaan saldo akhir laporan neraca pada SAK dengan laporan posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2008 sebesar Rp33.013.833.636,00 dengan rincian sebagai berikut.

Eselon I	SAK	Posisi BMN di Neraca	Selisih
Setjen	2.545.383.827	382.104.827	2,163,279,000
Itjen	505.008.431	233.710.307	271,298,124
DJBC	5.586.894.233	4.843.440.330	743,453,903
DJPK	4.588.559.911	243.300.260	4,345,259,651
DJPU	668.730.741	132.598.826	536,131,915

DJPB	5.921.072.628	2.380.269.653	3.540.802.975
DJKN	2.343.840.783	133.305.918	2.210.534.865
BPPK	12.826.883.863	10.075.326.575	3.202.065.399
BAPEPAM-LK	15.852.877.419	24.685.500	15.828.191.919
BKF	310.895.535	138.079.650	172.815.885
Jumlah	51.150.147.371	18.586.821.846	33.013.833.636

Beberapa catatan penting atas Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Selisih sebesar Rp2.163.279.000,00 pada Sekretariat Jenderal merupakan jasa renovasi rumah jabatan milik Sekretariat Negara di Jalan Widya Chandra yang digunakan oleh Menteri Keuangan.
2. Renovasi ruang kerja pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp271.365.000,00 menggunakan dana yang berasal dari belanja modal gedung dan bangunan, klasifikasi ke dalam akun Aset Tetap Lainnya dikarenakan Gedung Kantor bukan dalam pengelolaan Inspektorat Jenderal melainkan dalam pengelolaan Sekretariat Jenderal, sehingga terhadap penambahan nilai tersebut akan segera dikeluarkan dari pembukuan Inspektorat Jenderal dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang.
3. Aset Tetap Lainnya pada DJBC sebesar Rp743.453.900,00 merupakan aset renovasi.
4. Nilai aset tetap lainnya pada DJPK sebesar Rp 4.352.326.051,00 merupakan Belanja Modal untuk renovasi gedung milik Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan yang menggunakan DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (TA 2007 sebesar Rp 1.583.784.900,00 dan TA 2008 sebesar Rp2.768.541.151,00). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum dilakukan serah terima atas pekerjaan renovasi tersebut oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Oleh karena itu nilai tersebut masih diakui sebagai aset tetap pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disamping itu terdapat reklasifikasi aset rusak berat ke aset lain-lain sebesar Rp7.066.400,00.
5. Renovasi gedung AA.Maramis II milik Sekretariat Jenderal oleh DJPU sebesar Rp536.131.915,00 belum diserahterimakan.
6. Renovasi gedung AA.Maramis II dan rumah dinas Dirjen Pengelolaan Utang TA 2007 senilai Rp.2.472.485.700,00 telah diserahterimakan kepada Biro umum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dengan Berita Acara BAST-11/PU.1/2008 tanggal 14 agustus 2008 sehingga mengurangi nilai Aset tetap Lainnya sebesar nilai yang diserahkan.
7. Rehabilitasi gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga sebesar Rp3.540.802.975,00 pada DJPB. Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 04 tanggal 29 Desember 2006 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah bahwa transaksi tersebut disajikan akun Aset Tetap Lainnya.
8. Selisih lebih sebesar Rp2.210.534.865,00 pada DJKN merupakan aset renovasi.
9. Aset Tetap Lainnya pada BPPK sebesar 3.202.065.399,00 merupakan aset renovasi.
10. Aset Tetap Lainnya pada BAPEPAM-LK sebesar Rp15.828.191.919,00 merupakan aset tetap renovasi penataan ruang kerja gedung Sumitro Djojohadikusumo.

11. Aset Tetap Lainnya pada BKF sebesar Rp172.815.885,00 merupakan aset tetap renovasi penataan ruang kerja gedung Notohamiprodjo.

C.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp1.376.403.863,3
46,00

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp1.376.403.863.346,00 dan Rp1.293.271.578.300,00. Rincian jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 70 berikut.

Tabel 70
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	335,946,591,405	233,361,947,512	102,584,643,893
04	DJP	819,133,035,048	825,396,791,985	(6,263,756,937)
05	DJBC	203,904,337,890	226,932,031,792	(23,027,693,902)
08	DJPB	11,957,886,600	1,608,261,551	10,349,625,049
09	DJKN	1,961,983,633	5,649,126,260	(3,687,142,627)
11	BPPK	3,500,028,770	323,419,200	(3,176,609,570)
JUMLAH		1,376,403,863,346	1.293.271.578.300	83.132.285.046

Terdapat perbedaan saldo akhir Laporan Keuangan Audited TA 2007 dengan Saldo Awal laporan SIMAK-BMN TA 2008 sebesar Rp1.014.921.167.791,00 karena adanya penginputan saldo awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) melalui aplikasi SIMAK-BMN mulai Semester II Tahun Anggaran 2008. Sehingga data saldo awal KDP yang ada di SIMAK-BMN tidak mencerminkan saldo awal yang ada di neraca.

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disajikan pada tabel 71 berikut.

Tabel 71
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	278.350.410.509
Mutasi Tambah	2.027.468.598.709
Perolehan/Penambahan KDP	2.027.468.598.798
Mutasi Kurang	(918.239.841.248)
KDP Definitif	(918.239.841.248)
Saldo Akhir	1.387.579.167.970

Beberapa catatan penting atas aset Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Terdapat selsih antara antara Laporan Posisi BMN di Neraca dengan Neraca pada SAK sebesar Rp11.175.304.624,00 pada Sekretariat Jenderal karena adanya penyelesaian KDP yang tidak terbaca oleh aplikasi sebagai pengurang KDP, tetapi pada laporan BMN penyelesaian aset tercatat sesuai dengan Register Transaksi Harian (RTH) Penyelesaian Pembangunan. Selisih tersebut terdiri dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.934.104.156,00 serta Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.241.200.468,00

C.2.3.7 Peralatan dan Mesin BLU

Peralatan dan
Mesin BLU
Rp3.709.034.840,00

Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp3.709.034.840,00 dan Rp1.334.552.000,00. Jumlah tersebut merupakan Peralatan dan Mesin BLU pada Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Rincian Peralatan dan Mesin BLU per eselon I dapat dilihat pada tabel 72 berikut:

Tabel 72
Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU

Eselon I	1 Jan 2008	Mutasi		31 Des 2008
		Tambah	Kurang	
Setjen (PIP)	1.334.552.000	2.374.482.840	0	3.709.034.840
Jumlah	1.334.552.000	2.374.482.840	0	3.709.034.840

Mutasi tambah sebesar Rp2.374.482.840,00 terdiri dari:

Pembelian	2.351.184.840
Transfer Masuk	23.298.000
Saldo Akhir	2.374.482.840

C.2.3.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Jalan, irigasi, dan
jaringan BLU
Rp206.174.500,00

Jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp206.174.500,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU pada Pusat Investasi Pemerintah, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Rincian Peralatan dan Mesin BLU per eselon I dapat dilihat pada tabel 73 berikut.

Tabel 73
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

Eselon I	1 Jan 2008	Mutasi		31 Des 2008
		Tambah	Kurang	
Setjen (PIP)	0	206.174.500	0	206.174.500
Jumlah	0	206.174.500	0	206.174.500

Mutasi tambah sebesar Rp206.174.500 berasal dari pembelian dalam TA 2008.

C.2.3.9 Aset Tetap Lainnya BLU

Aset Tetap Lainnya
BLU
Rp42.224.380,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 masing-masing sebesar Rp42.224.380,00 dan Rp17.600.000,00. Jumlah tersebut merupakan Aset Tetap Lainnya BLU pada Pusat Investasi Pemerintah, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Rincian Aset Tetap Lainnya BLU per eselon I dapat dilihat pada tabel 74 berikut.

Tabel 74
Aset Tetap Lainnya BLU

Eselon I	1 Jan 2008	Mutasi		31 Des 2008
		Tambah	Kurang	
Setjen (PIP)	17.600.000	24.624.380	0	42.224.380
Jumlah	17.600.000	24.624.380	0	42.224.380

Mutasi tambah sebesar Rp24.624.380 berasal dari pembelian dalam TA 2008.

C.2.3.10 Informasi Tambahan Mengenai Aset Tetap

1. Telah dilakukan konversi dari SABMN ke SIMAK-BMN untuk seluruh satker lingkup Departemen Keuangan dan telah selesai pada Semester II Tahun Anggaran 2008.
2. Hasil inventarisasi dan penilaian Aset Tetap yang berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Kendaraan telah digunakan untuk koreksi saldo per 31 Desember 2004. Adapun hasil inventarisasi dan penilaian untuk inventaris masih ada yang belum digunakan untuk koreksi saldo awal, karena masih dalam proses penelitian.
3. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Nomor PER-51/PB/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, hasil penilaian tidak akan mengubah posisi aset di dalam laporan barang kuasa pengguna, yaitu jika sebelum penertiban, aset tersebut mempunyai nilai di atas kapitalisasi (intrakomptabel) dan setelah dilakukan penertiban, aset tersebut mempunyai nilai di bawah kapitalisasi (ekstrakomptabel) tetap akan terlaporkan dalam laporan barang kuasa pengguna intrakomptabel atau sebaliknya.

C.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp3.612.419.747.12,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp3.612.419.747.112,00 dan Rp3.520.418.997.156,00, merupakan saldo Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain, serta Dana Kelolaan BLU. Rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel 75 berikut.

Tabel 75
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Uraian	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
Tuntutan Perpendaharaan/TGR	8.857.225.495	6.480.383.549	2.376.841.946
Aset Tak Berwujud	201.420.558.400	37.418.315.534	164.002.242.866
Aset Tak Berwujud – BLU	484.208.790	-	484.208.790
Aset Lain-Lain	222.442.451.606	24.652.410.653	197.790.040.953
Dana Kelolaan-BLU	3.179.215.302.821	-	3.179.215.302.821
J U M L A H	3.612.419.747.112	68.551.109.736	3.543.868.637.376

C.2.4.1 Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tagihan Tuntuan Ganti Rugi/TGR per 31 Desember 2008 dan 2007 sebesar Rp8.857.225.495,00 dan Rp6.480.383.549,00, merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi pada UAPPA-E I lingkup Kementerian Keuangan. Tagihan ini jatuh temponya lebih dari 12 bulan mendatang.

Rincian Tagihan Perpendaharaan/ TGR dapat dilihat pada tabel 76 berikut.

Tabel 76
Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	1.826.894.331	1.165.609.671	661.284.660
02	ITJEN	38.022.100	440.000	37.582.100
04	DJP	689.565.763	647.216.968	52.248.795
05	DJBC	3.913.160.953	3.891.874.567	21.286.386
08	DJPB	2.287.292.348	473.251.146	1.814.041.202
09	DJKN	13.125.000	203.409.524	(190.284.524)
10	BAPEPAM-LK	80.165.000	80.165.000	-
11	BPPK	-	9.416.673	(9.416.673)
12	BKF	9.000.000	9.000.000	-
JUMLAH		8.857.225.495	6.480.383.549	2.386.741.946

Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi mengalami kenaikan sebesar Rp2.386.741.946,00 antara lain disebabkan adanya reklassifikasi dari Bagian Lancar Tagihan TGR di Sekretariat Jenderal sebesar Rp677.406.660,00 dan adanya kelebihan pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada seorang pegawai yang

telah diberhentikan dari Inspektorat Jenderal dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/UP.7/2005 tanggal 25 Januari 2005. Terhadap kelebihan pembayaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk diserahkan penagihannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan surat nomor S-63/K.1/2009 tanggal 12 Februari 2009 hal Pelimpahan Penagihan Kerugian Negara a.n. Drs. Wahyu Eko Budisantoso.

C.2.4.2 Aset Tak Berwujud

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp201.420.558.400,00 dan Rp37.418.315.534,00.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel 77 berikut.

Tabel 77
Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	46.778.997.834	34.355.597.834	12.423.400.000
03	DJA	41.659.200	41.659.200	-
04	DJP	83.231.383.947	-	83.231.383.947
05	DJBC	46.774.697.388	-	46.774.697.388
07	DJPK	925.677.765	-	925.677.765
08	DJPB	6.089.793.380	2.975.023.500	3.114.769.880
09	DJKN	10.183.824.876	-	10.183.824.876
10	BAPEPAM-LK	4.049.271.160	-	4.049.271.160
11	BPPK	230.417.350	46.035.000	184.382.350
12	BKF	3.114.835.500	-	3.114.835.500
JUMLAH		201.420.558.400	37.418.315.534	164.002.242.866

Jumlah Aset tak berwujud sebesar Rp201.420.558.400,00 terdiri dari *software* komputer, *License*, *E-book* dan hasil kajian ilmiah/paket data.

C.2.4.3 Aset Tak Berwujud BLU

Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp484.208.790,00. Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud Pusat Investasi Pemerintah.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel 78 berikut.

Tabel 78
Aset Tak Berwujud BLU

Eselon I	1 Jan 2008	Mutasi		31 Des 2008
		Tambah	Kurang	
Setjen (PIP)	0	484.208.790	0	484.208.790
Jumlah	0	484.208.790	0	484.208.790

C.2.4.4 Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp222.442.451.606,00 dan Rp24.652.410.653,00.

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel 76 berikut.

Tabel 76
Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Kode	Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
01	SETJEN	3.750.568.687	651.843.060	3.098.725.627
03	DJA	145.659.774.139	-	145.659.774.139
04	DJP	11.256.715.131	88.195.200	11.168.519.931
05	DJBC	18.253.932.473	2.179.600.778	16.074.331.695
08	DJPB	8.454.884.316	608.269.720	7.846.614.596
09	DJKN	4.047.698.676	-	4.047.698.676
10	BAPEPAM-LK	30.474.644.505	21.026.101.895	9.448.542.610
11	BPPK	362.772.162	-	362.772.162
12	BKF	-	98.400.000	-98.400.000
JUMLAH		222.442.451.606	24.652.410.653	197.790.040.953

Aset Lain-lain sebesar Rp222.442.451.606,00 terdiri dari reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi (dihentikan penggunaannya) karena dalam kondisi rusak berat sebesar Rp41.843.395.555,00, Piutang atas denda pasar modal dan denda perusahaan asuransi sebesar Rp28.282.802.356,00, TGR yang dilimpahkan penagihannya ke DJKN sebesar Rp152.700.000,00, Piutang Pungutan Ekspor yang dilimpahkan penagihannya ke DJKN sebesar Rp144.858.928.204,00, dan Piutang Cukai yang dilimpahkan penagihannya ke DJKN sebesar Rp7.304.625.491,00.

C.2.4.5. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebesar Rp3.179.215.302.821,00 dan Rp0. Dana Kelolaan BLU ini pada neraca per 31 Desember 2007 disajikan pada pos Dana Bergulir dalam kelompok Investasi Jangka Panjang. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 99 yang dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, Badan Usaha dan BLU oleh PIP yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat, PNBP dan tujuan lainnya. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2008 mencerminkan saldo Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan. Dana ini disimpan dalam bentuk giro pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0456207-3 sebesar Rp19.215.302.821,00; deposito berjangka dengan masa sampai dengan tiga bulan yang disimpan pada bank-bank umum dengan nilai total sebesar Rp3.060.000.000,00; dan deposito dengan masa enam bulan yang disimpan pada Bank Tabungan Negara (BTN) dengan nilai sebesar Rp100.000.000.000,00.

Rincian Dana Kelolaan BLU dapat dilihat dalam tabel 80 berikut.

**Tabel 80
Dana Kelolaan BLU**

No	Nama Bank	Jumlah Rupiah
1	Giro di Bank Mandiri	19,215,302,821
2	Deposito Bank Mandiri (1 bulan)	750,000,000,000
3	Deposito Bank BRI (1 bulan)	1,080,000,000,000
4	Deposito Bank Bukopin (1 bulan)	200,000,000,000
5	Deposito Bank Jabar (1 bulan)	200,000,000,000
6	Deposito Bank BNI (1 bulan)	430,000,000,000
7	Deposito Bank Mandiri Syariah (1 bulan)	100,000,000,000
8	Deposito Bank BTN (1 bulan)	200,000,000,000
9	Deposito Bank Permata (1 bulan)	100,000,000,000
10	Deposito Bank BTN (6 bulan)	100,000,000,000
Jumlah Dana Kelolaan BLU		3,179,215,302,821

C.2.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Rp343.821.563.014,
00.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp343.821.563.014,00 dan Rp2.024.920.395.221,00. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Uang Muka dari KPPN, Pendapatan yang Ditangguhkan, Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan pada tabel 81 berikut.

**Tabel 81
Posisi Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2008 dan 2007**

Uraian	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
Utang Kepada Pihak Ketiga	85.383.199.848	1.881.332.327.370	(1.795.949.127.522)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	248.976.889.176	-	248.976.889.176
Uang Muka dari KPPN	6.910.417.866	11.778.438.432	(4.868.020.566)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	2.551.056.124	131.809.629.419	(129.258.573.295)
JUMLAH	343.821.563.014	2.024.920.395.221	(1.681.098.532.207)

C.2.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp85.383.199.848,00 dan Rp1.881.332.327.370,00

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I disajikan dalam tabel 82 berikut.

Tabel 82

Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2008 dan 2007

Unit Eselon I	31 Des 2008	31 Des 2007	Kenaikan/Penurunan
Setjen	474.713.524	74.060.000	400.653.524
DJA	21.391.045.397	1.881.258.267.370	(1.859.867.221.973)
DJP	63.500.181.137	0	63.500.181.137
DJPB	2.772.515	0	2.772.515
DJKN	10.452.275	0	10.452.275
BPPK	4.035.000	0	4.035.000
JUMLAH	85.383.199.848	1.881.332.327.370	(1.795.949.127.522)

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp85.383.199.848,00 terdiri dari:

1. Kewajiban atas beban yang masih harus dibayar berupa remunerasi pegawai PIP Setjen yang dihitung secara akrual dari tanggal 16 sampai dengan akhir Desember 2008 sebesar Rp12.659.528,00, pembayaran kepada PT Infranet yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp420.381.268 dikarenakan kesalahan pemberian nomor rekening oleh pihak PT Infranet, dan pembayaran kepada konsultan hukum yang diberikan dalam bentuk cek tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum dicairkan oleh pihak terkait (*outstanding check*) sebesar Rp41.672.728,00.
2. Kewajiban pengembalian kelebihan Pungutan Eksport kepada pihak eksportir di DJA sebesar Rp21.391.045.397,00.
3. SPM Imbalan Bunga (SPM-IB) yang belum diterbitkan SP2D-nya per 31 Desember 2008 di DJP sebesar Rp63.500.181.137,00.
4. Langganan daya dan jasa yang belum dibayar di DJPB sebesar Rp2.772.515,00 dan di DJKN sebesar Rp10.452.275,00.
5. Uang Honorarium yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2008 di STAN BPPK sebesar Rp4.035.000,00.

C.2.5.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah masing-masing sebesar Rp248.976.889.176,00 dan Rp0. Jumlah tersebut merupakan SPM-KP per 31 Desember 2008 yang belum diterbitkan SP2D-nya di DJP dan sisanya sebesar Rp156.153.163,00 merupakan utang kelebihan pembayaran bea masuk milik DJBC.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagaimana tabel 83 berikut.

Tabel 83
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2008
(dalam rupiah)

Jenis Utang	Jumlah
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	162.829.357.506
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	85.982.655.857
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	2.617.507
Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB	6.105.143
Utang Kelebihan Pembayaran Bea Masuk	156.153.163
	248.976.889.176

C.2.5.3 Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar

Rp6.910.417.866,00 dan Rp11.778.438.432,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

C.2.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2008 dan 2007 masing-masing sebesar Rp2.551.056.124,00 dan Rp131.809.629.419,00. Jumlah tersebut merupakan PNBP yang belum disetor ke kas Negara oleh bendahara penerima sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan.

C.2.6 Ekuitas Dana Lancar

*Ekuitas Dana
Lancar
Rp93.438.918.681.5
07,00*

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari :

Cadangan Piutang	Rp	93.415.303.559.270
Cadangan Persediaan	Rp	136.695.886.025
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	Rp	(334.360.089.024)
Dana Lancar Lainnya (BLU)	Rp	221.279.325.236
Jumlah	Rp	93.438.918.681.507

C.2.6.1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	55.545.222.477.951
- Piutang Bukan Pajak	Rp	37.821.028.316.862
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp	236.813.241
- Piutang BLU Pengelola Dana Investasi	Rp	21.505.689.090
- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Lainnya	Rp	27.310.262.126
J U M L A H	Rp	93.415.303.559.270

C.2.6.2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan sebesar Rp136.695.886.025,00 merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan.

C.2.7 Ekuitas Dana Diinvestasikan

*Ekuitas Dana
Diinvestasikan
Rp34.128.347.754,4
15,00*

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi per 31 Desember 2008 terdiri dari:

- Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	Rp	828.379.875.579
- Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp	29.687.538.231.724
- Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp	3.612.419.747.112
J U M L A H	Rp	34.128.337.854.415

C.2.7.1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

Akun Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang sebesar Rp828.379.875.579,00

merupakan penyeimbang Investasi Jangka Panjang.

C.2.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp29.687.538.231.724,00 merupakan penyeimbang aset tetap.

C.2.7.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Akun Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp3.612.419.747.112,00 merupakan penyeimbang aset lainnya.

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan Penting Lainnya

1. Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan TA 2008 meliputi penataan organisasi, perbaikan sistem tata laksana, peningkatan manajemen sumber daya manusia, dan perbaikan struktur remunerasi. Untuk perbaikan struktur remunerasi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.01/2008 tentang Penetapan Besaran TKPKN, maka terjadi kenaikan realisasi Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) MAK 512411 pada TA 2008 sebesar Rp1.259.756.934.854,00 bila dibandingkan MAK 512411 untuk TA 2007 sebesar Rp2.736.279.124.000,00. Pada TA 2008 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) tersebut dibebankan pada Bagian Anggaran 015(BA 015).
2. Aset berupa rumah negara yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak seperti para pensiunan, hal ini sudah diupayakan pengosongan rumah negara dengan membentuk Tim Penertiban Penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) Milik Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta TA 2009.
3. Masih terdapat aset berupa tanah milik Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat, dan diperlukan kebijakan khusus untuk melaksanakan pengurusan sertifikasi tanah dimaksud.
4. Hasil inventarisasi dan penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penertiban Aset DJKN lingkup Kementerian Keuangan masih ada yang belum digunakan untuk koreksi saldo awal aset tetap, khususnya untuk barang inventaris yang berupa peralatan kantor. Hal ini dikarenakan volume barang yang besar dan beragam, serta masih dilakukan penelitian.
5. Penetapan STAN sebagai Badan Layanan Umum (BLU) penuh mulai tanggal 31 Maret 2008 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.05/2008 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Namun operasional BLU STAN mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2008.
6. Sehubungan dengan penggunaan aplikasi persediaan mulai semester II TA 2008 ternyata mengakibatkan adanya pergeseran klasifikasi komponen persediaan secara otomatis. Dengan demikian rincian persediaan berdasarkan aplikasi persediaan yang baru berbeda dengan yang selama ini digunakan dan secara otomatis melalui aplikasi tertampung dalam akun uraian akun tidak ada, namun secara total tetap sama.

D PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK-RI terlampir.

2. Rekening Pemerintah

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan terlampir.